PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

JL. CUT NYAK DIEN NO. 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tahun akhir untuk periode perencanaan sesuai Renstra tahun 2019-2024. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2023 Dinas Pendidikan. Selain capaian kinerja tahun 2023, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024 Dinas Pendidikan.

Tahun 2023 Dinas Pendidikan melaksanakan enam program pembangunan pendidikan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan

dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Pendidikan sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun–tahun mendatang.

Tantangan seperti memperbaiki layanan pendidikan bermutu sesuai dengan SPM dan SNP, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan selama tahun 2023. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pekanbaru,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19790704 199810 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I ..PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 STRUKTUR ORGANISASI 2

1.3 TUGAS DAN FUNGSI 27

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 28

1.5 PERMASALAHAN UTAMA 29

1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI 32

BAB II PERENCANAAN KINERJA 36

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 37

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 43

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 37

3.2 REALISASI ANGGARAN 105

BAB IV PENUTUP 109

4.1 KESIMPULAN UMUM 109

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS 111

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
1.1	Kondisi ASN berdasarkan Jabatan	26
1.2	Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan	27
1.3	Identifikasi Permasalahan Pendidikan	30
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau	39
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023	40
2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Riau	41
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	44
3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	45
3.3	Target, realisasi dan capaian Kinerja Rata-rata lama Sekolah	47
3.4	Rata- rata Lama Sekolah tahun 2023	47
3.5	Target, realisasi dan capaian Kinerja Harapan lama Sekolah	49
3.6	Harapan lama sekolah	50
3.7	Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja APK SM Sederajat	53
3.8	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2023	53
3.9	Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja APM SM Sederajat	56
3.10	APM Sekolah Menengah Sederajat k abupaten Kota	57
3.11	Target, Realisasi, Dan Capaian Angka Putus sekolah Tahun 2023	58
3.12	Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota	59
3.13	Target, Realisasi, Dan Capaian Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi **A**	62
3.14	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	63
3.15	Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	66

3.16 Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2023 66
3.17 Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 67
3.18 Rata-Rata Lama Sekolah..... 68
3.19 Harapan Lama Sekolah 69
3.20 Perbandingan Realisasi Indikator KinerjaAPK SM sederajat 70
3.21 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja APM SM Sederajat..... 71
3.22 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator KinerjaAngka Putus Sekolah SM sederajat..... 72
3.23 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase SMA dan SMK yang terakreditasi A..... 73
3.24 Tabel Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau 73
3.25 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2023..... 74
3.26 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Akhir Renstra Tahun 2024 77
3.27 Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional 80
3.28 Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Angka Partisipasi kasar..... 81
3.29 Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional APM..... 82
3.30 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 84
3.31 Realisasi Kinerja dan Anggaran 96
3.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 98
3.33 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 94
3.34 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau..... 106
3.35 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau 108
4.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023..... 110

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau	24

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK		HALAMAN
1.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	26
1.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan	27
3.1	Rata-rata lama sekolah tahun 2023.....	48
3.2	Harapan Lama Sekolah.....	51
3.3	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2023.....	54
3.4	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2023.....	57
3.5	Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun	60
3.6	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A Se Prov. Riau	64
3.7	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional APK	81
3.8	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional APM	83

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
3. SK Tim Penyusun Dokumen LKjIP Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Sekretaris Daerah Nomor Kpts. 159/IV/2023 tentang Pedoman Pengumpulan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas

Pendidikan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang- undangan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7).

Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan berdasarkan pergub prov riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang kedudukan Sususnan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Nomor 21) terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
    2. Sub bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA).

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK).

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
2. Bidang dibantu oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional.
3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Kepala Dinas Pendidikan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)
5. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
6. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon lV.a).

1.2.2 Tugas dan Fungsi sesuai susunan organisasi

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah serta pelaksanaan urusan dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana alokasi khusus yang

ditugaskan kepada Daerah**.**

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
   - penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
   - pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
   - pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
   - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
   - pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan

Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, mengendalikan kebijakan dan melaksanakan pelayanan teknis administrative.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   - membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Dinas, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
   - pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Sekretariat;
   - pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat;
   - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan;
   - mengkoordinasikan perumusan, pengkajian bahan saran pertimbangan bidang Pendidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
   - mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, dan pelaksanaan Urusan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
   - mengkoordinasikan pengendalian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;

- mengkoordinasikan pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas;
- mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
- mengkoordinasikan pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Pendidikan Khusus;
- mengkoordinasikan manajemen, pengkajian, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan data pokok Pendidikan serta pengembangan sistem informasi Pendidikan;
- mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis penyelenggaraan pembiayaan pengelolaan Pendidikan;
- mengkoordinasikan pengkajian, penyiapan, penyusunan, pengusulan dan pengumpulan dokumen Rencana Strategis (RenStra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Penja serta Rencana Aksi), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ PD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Inovasi PD;

- pengkajian verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- mengkoordinasikan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisa realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Perangkat Daerah;
- mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan baik Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan;
- memfasilitasi penyelesaian masalah hukum di lingkungan Dinas, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, administrasi keuangan, perlengkapan, pengelolaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan, pengelolaan dan menyediakan layanan administratif urusan rumah tangga di lingkungan Dinas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Mempunyai Tugas :
   - membantu dan mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian dan Umum serta antar Instansi Pemerintah;
   - melaksanakan perumusan bahan saran pertimbangan mengenai Kepegawaian dan Umum sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
   - melaksanakan penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
   - mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan validasi dan pemutakhiran data kepegawaian di lingkungan Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
   - melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan di lingkup Kepegawaian dan Umum;
   - melaksanakan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup Kepegawaian dan Umum;
   - mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian masalah hukum kepegawaian, dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
   - penyelenggaraan pemberian penghargaan dan cinderamata peserta didik berprestasi akademik dan non akademik;
   - melaksanakan penerimaan, dan pendistribusian surat,

penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

- pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara bagi pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan;
- penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan pendataan dan penataan pendistribusian, mutasi, promosi, guru dan tenaga kependidikan, penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI), Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta urusan kepegawaian lainnya;
- menyiapkan kebutuhan bahan pelaksanaan, penyelenggaraan administrasi urusan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
- penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :
   - membantu dan mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta antar Instasi Pemerintah;
   - pelaksanaan perumusan bahan saran pertimbangan mengenai Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;

- penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan, pemeriksaan, merapatkan realisasi capaian kinerja dan anggaran Dinas, Cabang serta menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan di lingkungan Dinas;
- penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- penyelenggaraan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- pengkajian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- pelaksanaan penyusunan laporan hasil verifikasi dan pembukuan keuangan;
- penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan pengelolaan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;

- pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Eguitas (LPE), neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- pelaksanaan dan penyiapan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan, pegawai setiap bulannya dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- pelaksanaan dan penyiapan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.

8. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Atas.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

- membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan

Sekolah Menengah Atas;

- pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan

minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

- penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan serta pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkupan jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
- mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;

- pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta pendidik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan

pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/dunia industri di sekolah pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyelenggaraan kegiatan bina karakter dan Pendidikan Vokasi serta revitalisasi di era industri pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, tidak mampu dari segi sosial ekonomi.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas

serta antar Instasi Pemerintah;

- mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik bidang pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan, peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan asesmen autis, terapi serta transisi untuk persiapan

mengikuti pendidkan inklusif di sekolah regular;

- penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan ayat (3) diubah

11. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan operasional pembinaan dan peningkatan karir, peningkatan mutu dan profesionalisme, pemberian penghargaan, pelayanan perlindungan profesi serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi;

- membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan,

pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instasi Pemerintah;

- mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- pelaksanaan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- peningkatan mutu serta karakter pendidik;
- perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, peningkatan mutu dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan;
- penyusunan dan penyelenggaraan Pendidikan berbasis muatan lokal budaya melayu Riau baik Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan dan pelaksanaan pembinaan serta peningkatan karir Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

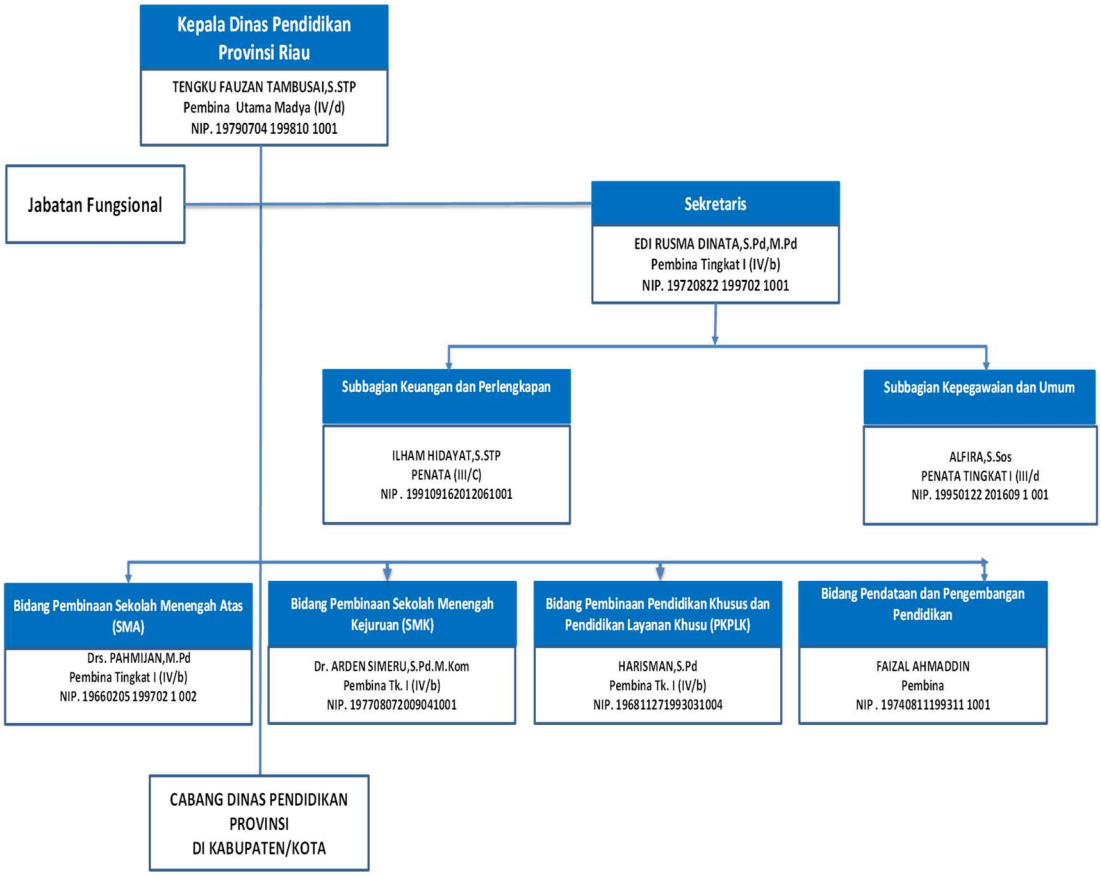
- penyusunan perumusan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan assesment Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan dan pelaksanaan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan dan pelaksanaan pemberian penghargaan serta memberikan pelayanan perlindungan profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan organisasi profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3 Gambar Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai dengan kewenangannya, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Masih adanya Kesenjangan Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah ataupun di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pendidikan, kesulitan menjangkau lokasi pendidikan dan rendahnya kemampuan ekonomi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Masih adanya Kesenjangan Kualitas pendidikan antara perkotaan dengan di daerah. Hal ini disebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan dan belum meratanya penyebaran guru dan Penerapan kurikulum 2013 yang belum maksimal
3. Belum terdapatnya kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
4. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarpras pendidikan menengah terutama kejuruan
5. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai
6. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik.

1.3.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Riau

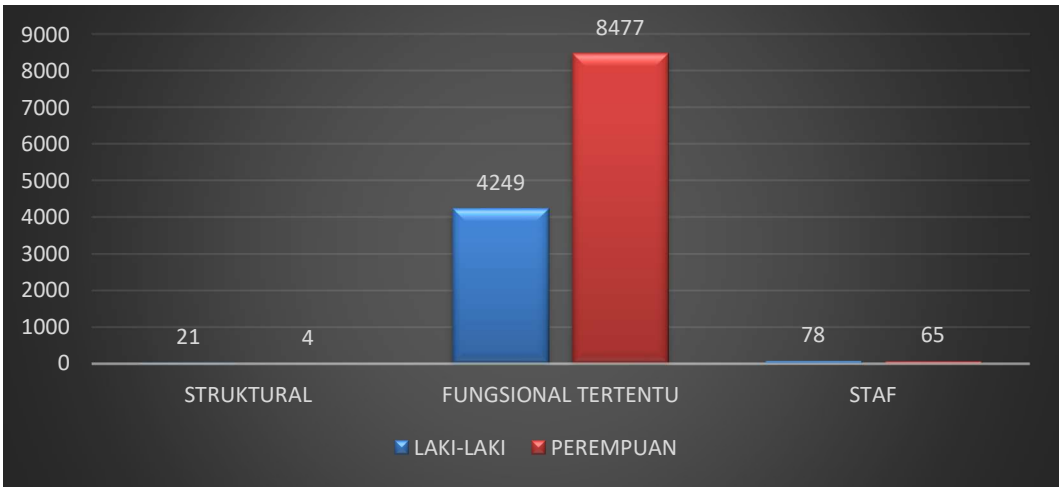
Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam

organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 12.894 Pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi ASN berdasarkan Jabatan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH ASN BERDASARKAN							
		STRUKTURAL				JUMLAH	FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV				
1	Laki-laki	0	1	9	11	21	4249	78	4348
2	Perempuan	0	0	0	4	4	8477	65	8546
TOTAL ASN						25	12726	143	12894

Grafik 1.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



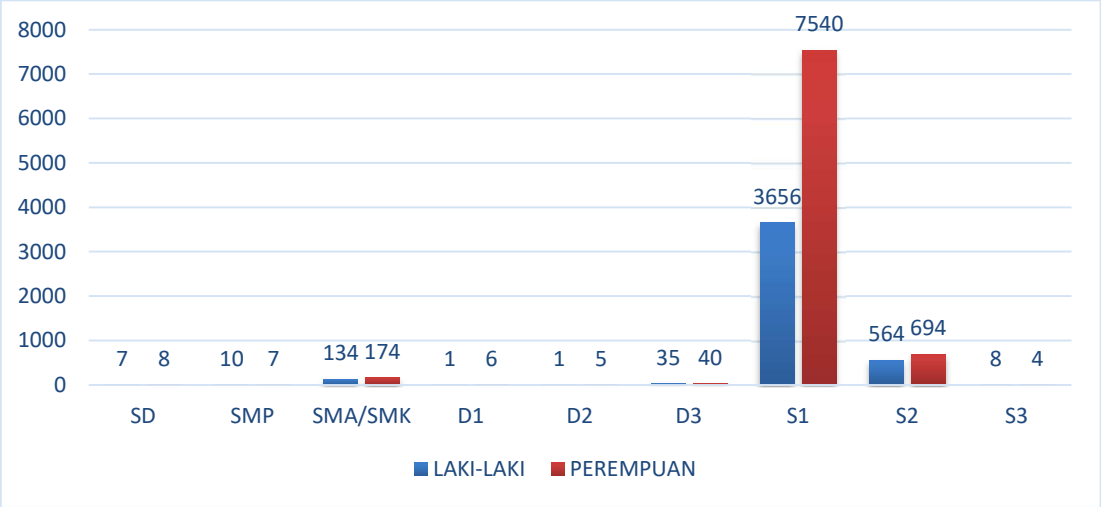
sumber data : (Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa ASN pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pengawas sebanyak 12.726 orang, dan Jabatan Struktural sebanyak 25 orang.

Tabel 1.2
Klasifikasi ASN menurut Pendidikan

JENIS KELAMIN	JUMLAH ASN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN									
	SD	SMP	SMA/SMK	D1	D2	D3	S1	S2	S3	JUMLAH
LAKI-LAKI	7	10	134	1	1	35	3656	564	8	4416
PEREMPUAN	8	7	174	6	5	40	7540	694	4	8478
	15	**17**	**308**	**7**	**6**	**75**	**11196**	**1258**	**12**	**12894**

Grafik 1.2
Klasifikasi ASN Menurut Pendidikan



(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Dari data pada tabel 1.2 diketahui bahwa pendidikan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1) yang berjumlah 11.196 orang dan SMA/SMK Sederajat berjumlah 308

orang. Jika dilihat dari ASN yang memiliki tingkat pendidikan S2 dan S3 adalah sebanyak 1.270 orang dari seluruh ASN Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang ditemukan tentu perlu menjadi bahan antisipasi agar dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan hingga akhir periode Renstra Dinas Pendidikan dapat menjadi lebih baik. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan terdapat pada table 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meratanya akses pendidikan	Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Masih terbatasnya daya tampung pendidikan menengah dan layanan khusus
			Masih rendahnya kualitas ruang kelas
		Masih terdapat calon peserta didik/ peserta didik yang sulit menjangkau akses layanan pendidikan	Masih terbatasnya pembiayaan operasional sekolah yang dianggap memberatkan peserta didik
			Masih terdapat daerah yang secara teknis belum dapat didirikan sekolah menengah
2.	Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan	Masih rendahnya kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
			Belum optimalnya pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah
			Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan khusus
		Belum Optimalnya Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Belum optimalnya kerjasama pendidikan kejuruan dengan Dunia Usaha Dunia Industri
			Masih rendahnya manajemen sekolah berbasis vokasi
			Masih belum terpenuhinya sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri

1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

1. Perencanaan Kinerja
   a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya mengambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
   b. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat memberikan informasi tentang hubungen kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
   c. Setiap Unit/satuan kerja pada bidang/bagian belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan
2. Pengukuran Kinerja

   Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menginput aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkata oleh Perangkat Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
3. Pelaporan Kinerja

   Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang

telah diperjanjikan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
    a. Dalam peningkatan implementasi SAKIP belum sepenuhnya melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP
    b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
    c. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

B. Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP
    1. Perencanaan Kinerja
        a. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
        b. Menyusun Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
        c. Setiap unit/satuan kerja pada bidang/bagian memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

2. Pengukuran Kinerja

Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

3. Pelaporan Kinerja

-

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP
b. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
c. Memanfaatkan Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

a. Telah menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
b. Telah menyusun Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
c. Setiap unit/satuan kerja pada bidang/bagian telah memahami

dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

2. Pengukuran Kinerja Telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang melalui Rapat Kerja
3. Pelaporan Kinerja

   -

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a. Telah Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP
   b. Telah Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
   c. Telah Memanfaatkan Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dengan adanya perencanaan kinerja ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas dan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan kinerja dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau merubah RPJMD dan mengacu pada perubahan RPJMD, Dinas Pendidikan membuat Renstra untuk Periode Tahun 2019-2024.

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

Visi Gubernur Riau terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (RIAU BERSATU). Misi Gubernur Riau untuk Pendidikan adalah misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan Gubernur Riau meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat. Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Riau dalam Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau bertujuan menyelenggarakan Pendidikan wajib belajar 12 Tahun. Untuk memenuhi Tujuan SDGs yang keempat yaitu memastikan dapat dicapai melalui program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, dibidang Pendidikan Menengah yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dengan adanya Program dan Kegiatan bidang Pendidikan mendukung visi dan misi Gubernur Riau akan berdampak positif terhadap capaian program nasional terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sehingga akan meningkat indeks Pembangunan manusia (IPM) meningkatkan RLS dan meningkatkan HLS di Provinsi Riau

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau antara lain:

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi Kepala Daerah, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2019-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran- ukuran terlaksananya misi Kepala Daerah.

1.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis Dinas Pendidikan tahun 2019-2024 adalah "**Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**".

Adapun Indikator program Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut :

- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
- Harapan Lama Sekolah (tahun)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikuit:
     1) Rata-Rata Lama Sekolah
     2) Harapan Lama Sekolah
2. Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikuit:
     1) APK SM Sederajat
     2) APM SM Sederajat
     3) Angka Putus Sekolah SM Sederajat
3. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan.
   - Adapun Indikator Sasaran/ kinerja adalah sebagai berikut :
     - Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat		1 Rata-rata Lama Sekolah	9.14	9,19	9.24-9.30	9.29-9.35	9.35-9.40
			2 Harapan Lama Sekolah	13,2	13,28	13.37-13.47	13.44-13.53	13.44-13.60
		1 Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	1 APK SM Sederajat	84,61	88,9	90,4	91,9	92,4
			2 APM SM Sederajat	64,01	64	66,36	67,88	68
			3 Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,76	0,94	0,74	0,73	0,7
		2 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	- Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang	93,32	93,71	94,12	94,52	94,92

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan tahun 2019-2024 dan sumber daya anggaran (murni) yang ada, Dinas Pendidikan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Dalam rangka upaya perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi sekaligus penandatanganan komitmen bersama seluruh Kepala perangkat daerah dalam rangka peningkatan SAKIP yang diadakan di Hotel Prime Park pada tanggal 14-15 Juni 2023 bersama dengan evaluator dari MENPANRB maka di lakukan perbaikan terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2023 sesuai

arahan Evaluator. Berikut Isi dari perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	**2**	**3**		**4**
1	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	1.	APK SM Sederajat	91,90
		2.	APM SM Sederajat	67,88
		3.	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73
2	Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A		44,94
No	**Program**	**Anggaran**		**Keterangan**
1	**2**	**3**		**4**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	1.202.707.571.086	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	1.306.785.164.997	APBD
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	708.689.937	APBD
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	387.069.596	APBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp.	266.741.126	APBD

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur >25 Tahun	9,29-9,35
		2.	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53
2	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	1.	APK SM Sederajat	91,90
		2.	APM SM Sederajat	67,88
		3.	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73
3	Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A		44,94
4	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		74
No	Program	Anggaran		Keterangan
1	2	3		4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	1.202.707.571.086	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	1.306.785.164.997	APBD
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	708.689.937	APBD
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	387.069.596	APBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp.	266.741.126	APBD

Bahwa target yang tercantum dalam dokumen ini merupakan terget yang telah di tetapkan pada dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 sementara untuk pagu kegiatan merupakan pagu yang telah di tetapkan pada Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas

Pendidikan Provinsi Riau tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya dilaksanakan agar target capaian dapat di capai sebagaimana mestinya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas pendidikan Provinsi Riau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,32	99,68
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,30	98,30
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,90	90,44	98,41
		2	APM SM Sederajat	67,88	66,43	97,86
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,18	405,56
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A		44,94	43,51	96,82
4	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		74	73,25	98,99

3.1.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidupmelek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mempunyai tujuan Meningkatnya Derajat Pendidikan dengan Indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan suatu daerah. HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

1. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun

RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah Sumber Data BPS dengan rumus sebagai berikut :

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Keterangan:
RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun
N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Tabel 3.3
Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,32	99,68

Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 99,68% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan pada tahun 2023 berhasil dicapai. RLS pada tahun yang 2023 adalah 9.32 yang artinya penduduk usia 25 tahun keatas telah menamatkan sekolah tingkat SMP atau menduduki SLTA tahun pertama (kelas 10).

Berikut pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

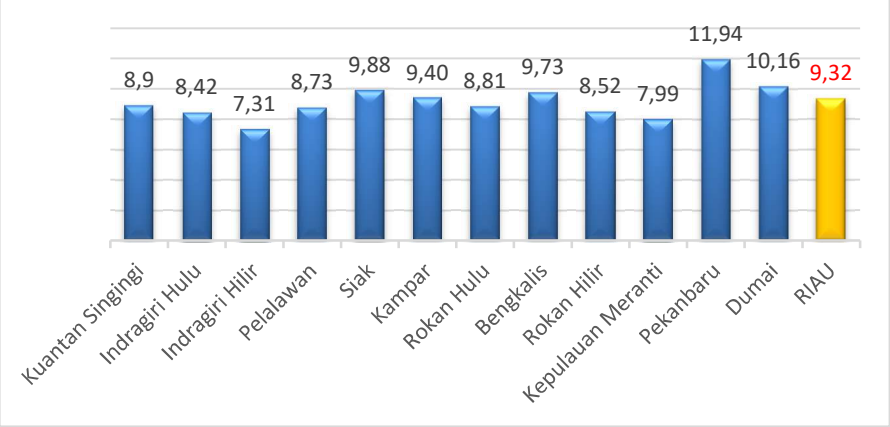
Tabel 3.4
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023
1	**Kuantan Singingi**	8.90
2	**Indragiri Hulu**	8.42
3	**Indragiri Hilir**	7.31
4	**Pelalawan**	8.73
5	**Siak**	9.88
6	**Kampar**	9.40

7	**Rokan Hulu**	8.81
8	**Bengkalis**	9.73
9	**Rokan Hilir**	8.52
10	**Kepulauan Meranti**	7.99
11	**Pekanbaru**	11.94
12	**Dumai**	10.16
RIAU		**9.32**

sumber data : BPS Provinsi Riau

Grafik 3.1
Rata -rata lama sekolah (RLS) tahun 2023



Tabel 3.4 dan grafik 3.1 tersebut menunjukkan ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang capaian RLS berada dibawah Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi (8,90), Kabupaten Rokan Hulu (8,81), Kabupaten Pelalawan (8,73), Kabupaten Rokan Hilir (8,52), Kabupaten Indragiri Hulu (8,42), Kabupaten Kepulauan Meranti (7,99), Kabupaten Indragiri Hilir (7,31), dan dengan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang Sumber Data BPS dengan rumus sebagai berikut :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:
HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
i = Usia (a, a + 1, ..., n)
FK = Faktor koreksi pesantren

Tabel 3.5
Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja
Harapan Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,30	98,30

Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 98,30% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan pada tahun 2023 berhasil dicapai. HLS pada tahun yang 2023 adalah 13,30 yang artinya berarti anak-anak usia 7 tahun berpeluang tamat diploma I atau mengecap pendidikan hingga perguruan Tinggi tingkat pertama. Data tersebut memperlihatkan bahwa ada peluang bersekolah sampai perguruan tinggi, tetapi kenyataannya banyak yang putus sekolah sampai SMP.

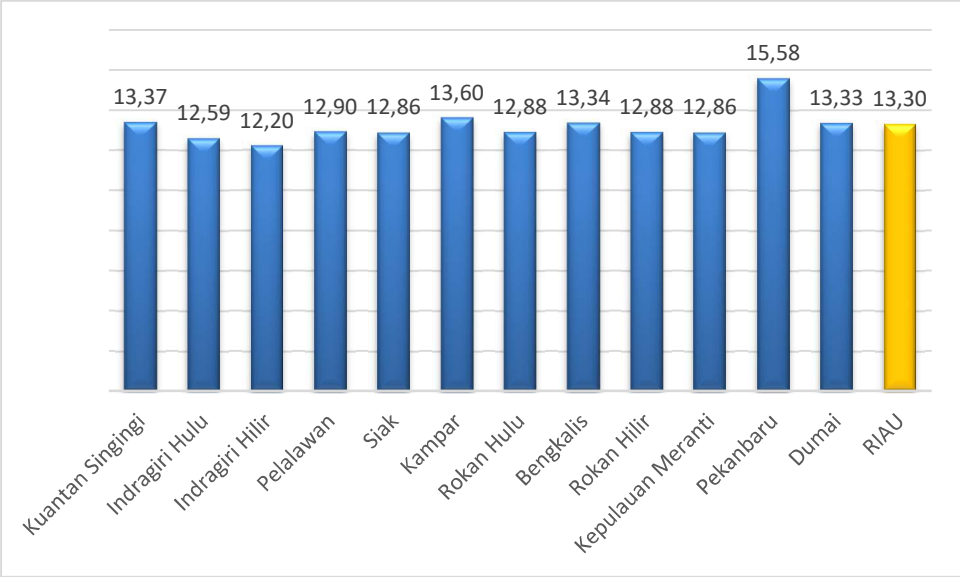
Berikut pencapaian Harapan Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.6
Harapan Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah Tahun 2023
1	**Kuantan Singingi**	13.37
2	**Indragiri Hulu**	12.59
3	**Indragiri Hilir**	12.20
4	**Pelalawan**	12.90
5	**Siak**	12.86
6	**Kampar**	13.60
7	**Rokan Hulu**	12.88
8	**Bengkalis**	13.34
9	**Rokan Hilir**	12.88
10	**Kepulauan Meranti**	12.86
11	**Pekanbaru**	15.58
12	**Dumai**	13.33
	RIAU	**13.30**

sumber data : BPS Provinsi Riau

Grafik 3.2
Harapan Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023



Tabel 3.6 dan grafik 3.2 tersebut menunjukkan capaian HLS tertinggi Harapan Lama Sekolah HLS) yaitu Kota Pekanbaru sebesar 15,58 yang berada diatas HLS Provinsi Riau. Sedangkan Capaian HLS terendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 12,20.

B. Meningkatnya akses Pendidikan

Dalam meningkatkan akses Pendidikan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan

atau lebih baik dari peringkat IPM periode sebelumnya. Untuk itu, sampai dengan tahun 2022 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Riau senantiasa perlu terus ditingkatkan, agar dapat selaras dengan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu:

1. APK SM Sederajat.
2. APM SM Sederajat
3. Angka Putus Sekolah SM Sederajat

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat

Indikator APK SM Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SM Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 } - \text{ 18 Tahun}} X\ 100\%$$

Tabel 3.7
Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja APK SM Sederajat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. APK SM Sederajat	91,90	90,44	98,41

Meningkatnya akses Pendidikan merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "APK SM Sederajat".

Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 98,41% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya akses Pendidikan pada tahun 2023 berhasil dicapai.

Berikut pencapaian angka partisipasi kasar APK SM Sederajat Provinsi Riau tahun 2023 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

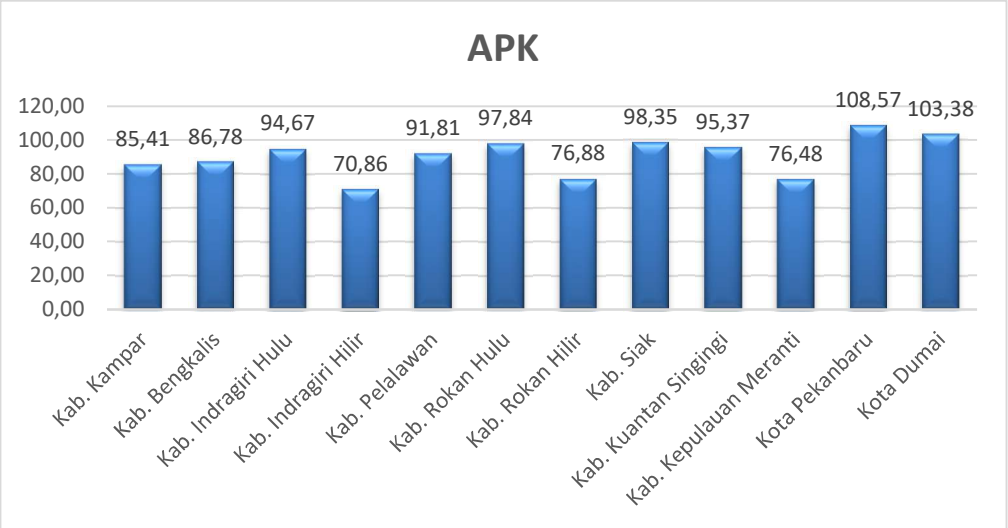
Tabel 3.8
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota
se Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
1	Kab. Kampar	46.648	39.841	85,41
2	Kab. Bengkalis	37.333	32.399	86,78
3	Kab. Indragiri Hulu	22.970	21.746	94,67
4	Kab. Indragiri Hilir	40.739	28.867	70,86
5	Kab. Pelalawan	19.576	17.972	91,81
6	Kab. Rokan Hulu	28.345	27.734	97,84
7	Kab. Rokan Hilir	45.150	34.713	76,88

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
8	Kab. Siak	25.747	25.323	98,35
9	Kab. Kuantan Singingi	16.571	15.804	95,37
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.827	8.280	76,48
11	Kota Pekanbaru	61.175	66.416	108,57
12	Kota Dumai	15.668	16.197	103,38
	Provinsi Riau	370.749	335.292	90,44

Sumber Data : APK dan APM dari website : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id

Grafik 3.3
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/KotaSe Provinsi Riau
Tahun 2023



Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Tabel 3.8 dan grafik 3.3 tersebut menunjukkan ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Kampar (85,41%), Kabupaten Bengkalis (86,78%), Kabupaten Indragiri Hilir (70,86%), Kabupaten Rokan Hilir (76,88) dan Kabupaten Kep. Meranti (76,48)

dengan capaian terendah adalah Kabupaten Kampar sedangkan capaian tertinggi adalah Kota Pekanbaru (108,57%). Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah yang seharusnya mendapat prioritas utama terhadap program dan kegiatan adalah Kabupaten Indragiri Hilir , Rokan Hilir,Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Kampar

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SM Sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SM sederajat Usia 16 – 18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \text{ X } 100\%$$

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan program pembangunan sekolah terpadu, dengan kegiatan antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru.

Untuk mengukur ketercapaian indikator ini diperlukan data Jumlah siswa

Sekolah Menengah Sederajat Usia 16-18 Tahun dan jumlah penduduk usia 16–18 Tahun. Indikator APM SM Sederajat diperoleh dengan cara membagi Jumlah siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun dikalikan 100%.

Berdasarkan data dari Data Referensi Pendidikan Kemendikbud RI, tahun 2023 siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun di Provinsi Riau berjumlah 246,284 dan jumlah penduduk berusia 16–18 Tahun berjumlah 370,749 jiwa, dengan demikian APM SM sederajat Provinsi Riau adalah 66,43%. Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Target, Realisasi, Dan Capaian
APM Sekolah Menengah Sederajat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SM Sederajat	67,88	66,43	97,86

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Meningkatnya akses Pendidikan merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "APM SM Sederajat".

Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 97,86% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya akses Pendidikan pada tahun 2023 berhasil dicapai.

Berikut pencapaian APM SM Sederajat Provinsi Riautahun 2023 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

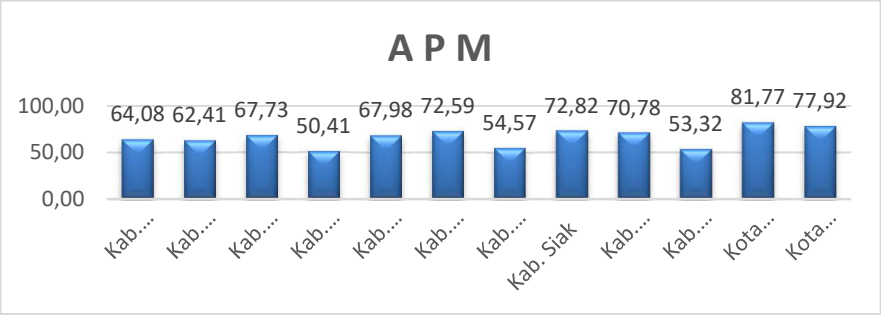
Tabel 3.10
APM Sekolah Menengah Sederajat k abupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun	APM %
1	Kab. Kampar	46.648	29.890	64,08
2	Kab. Bengkalis	37.333	23.301	62,41
3	Kab. Indragiri Hulu	22.970	15.557	67,73
4	Kab. Indragiri Hilir	40.739	20.535	50,41
5	Kab. Pelalawan	19.576	13.308	67,98
6	Kab. Rokan Hulu	28.345	20.575	72,59
7	Kab. Rokan Hilir	45.150	24.637	54,57
8	Kab. Siak	25.747	18.748	72,82
9	Kab. Kuantan Singingi	16.571	11.729	70,78
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.827	5.773	53,32
11	Kota Pekanbaru	61.175	50.022	81,77
12	Kota Dumai	15.668	12.209	77,92
	Provinsi Riau	**370.749**	**246.284**	**66,43**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.4

APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2023



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.10 dan grafik 3.4 tersebut diatas terdapat 3 (tiga) Kabupaten/kota yang realisasi capaian APM SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata APM Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (50,41%), Kabupaten Rokan Hilir (54,57%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (53,32%) dengan capaianAPM terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan realisasi capaianAPM SM Sederajat tertinggi adalah Kota Pekanbaru (81,77%).

3. Angka Putus Sekolah SM sederajat

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 16-18 tahun tingkat SMA sederajat.

APtS dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SM sederajat}}{\text{Jumlah seluruh siswa SM sederajat}} \text{ X } 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Target, Realisasi, Dan Capaian
Angka Putus sekolah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,18	405,56

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 405,56% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2023 berhasil dicapai.

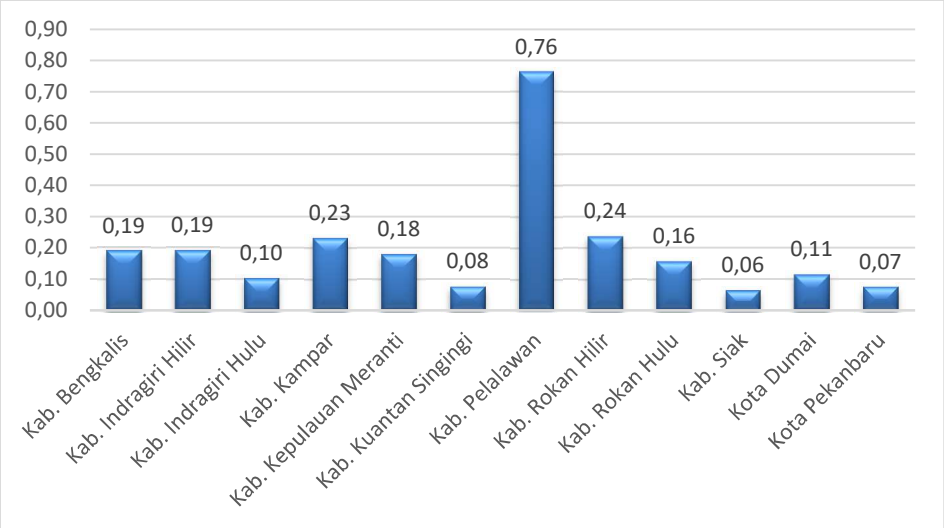
Berikut pencapaian Angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau tahun 2023 terlihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.12
Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2023

NO	Kabupaten	Jumlah siswa putus sekolah SMA dan SMK	Jumlah siswa keseluruhan SMA dan SMK	Persentase siswa putus sekolah
1	Kab. Bengkalis	53	28.021	0,19
2	Kab. Indragiri Hilir	36	19.007	0,19
3	Kab. Indragiri Hulu	18	17.791	0,10
4	Kab. Kampar	67	29.107	0,23
5	Kab. Kep.Meranti	11	6.217	0,18
6	Kab. Kuantan Singingi	10	13.220	0,08
7	Kab. Pelalawan	123	16.130	0,76
8	Kab. Rokan Hilir	64	27.124	0,24
9	Kab. Rokan Hulu	36	23.104	0,16
10	Kab. Siak	13	20.838	0,06
11	Kota Dumai	16	14.199	0,11
12	Kota Pekanbaru	41	56.057	0,07
	Total	**488**	**270.815**	**0,18**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.5
Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota
Tahun 2023



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APtS SM Sederajat berada jauh di atas rata-rata APtS Provinsi yaitu Kabupaten Kampar (0,23%), Kabupaten Pelalawan (0,76%) dan Kabupaten Rokan Hilir (0,24%), dengan capaian APtS tertinggi adalah Kabupaten Pelalawan sedangkan capaian APtS terendah adalah Kabupaten Siak (0,06%).

C. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: I) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk

akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 50 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan; 3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh : (a) Pemerintah Pusat; dan/atau, (b) lembaga mandiri. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu

1. **Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi**

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakriditasi digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SMA, SMK dan SLB yang Terakreditasi}}{\text{JumlahSeluruh Sekolah SMA,SMK dan SLB}} X\ 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Target, Realisasi, Dan Capaian
Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	94,94	43,51	96,82

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Tabel 3.14
Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A
se Provinsi Riau Tahun 2023

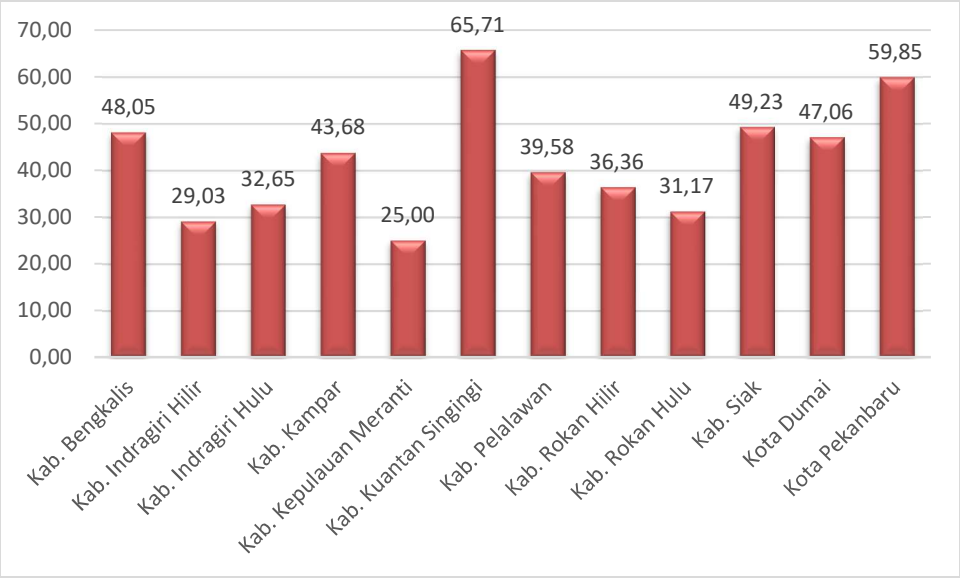
NO	KAB/KOTA	JUMLAH SMA DAN SMK	JUMLAH SMA SMK YANG BERAKREDITASI A	PERSENTASE SMA DAN SMK YANG BERAKREDITASI A
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kab. Bengkalis	77	37	90,41
2	Kab. Indragiri Hilir	62	18	100
3	Kab. Indragiri Hulu	49	16	100
4	Kab. Kampar	87	38	96,92
5	Kab. Kepulauan Meranti	32	8	91,49
6	Kab. Kuantan Singingi	35	23	93,59
7	Kab. Pelalawan	48	19	91,4
8	Kab. Rokan Hilir	88	32	95,92
9	Kab. Rokan Hulu	77	24	86,15
10	Kab. Siak	65	32	93,98
11	Kota Dumai	34	16	92,31
12	Kota Pekanbaru	132	79	86,11
	TOTAL	**786**	**342**	**43,51**

sumber: Data Referensi Kemendikbud

Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 96,82% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan pada tahun 2023 berhasil dicapai.

Adapun pencapaian Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A tahun 2023 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Grafik 3.6
Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A
Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.14 dan grafik 3.6 tersebut diatas terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang realisasi/capaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi berada jauh di bawah rata-rata Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (29,03%), Kabupaten Indragiri hulu (32,65%), Kabupaten Kep. Meranti (25,00%), Kabupaten Pelalawan (39,58%), Kabupaten Rohil (36,36%) dan Kabupaten Rohul (31,17%), dengan capaian Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A paling rendah adalah Kabupaten Kep. Meranti sedangkan capaian Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A paling tinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi (65,71%).

D. Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Penguatan akuntabillitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) Instansi- nya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD/RENSTRA/PERJANJIAN KINERJA (PENJA). Adapun Indikator Kinerja Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Tabel 3.15
Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74	73,25	98,99

Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau ditargetkan sebesar 74 dan Realisasi Kinerja sebesar 73,25 dengan capaian Kinerja 98,99%, dengan tingkat akuntabilitas kinerja 73,25. Berikut pencapaian Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15	15,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	14,75
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**73,25**
	Tingkat Akuntabiltas Kinerja		**BB**

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 3.17
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2022		
				Target 2023	Realisasi Kineja 2023	% Capaian	Target 2022	Realisasi Kineja	% Capaian
1	2	3		7	8	9	7	8	9
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,32	99,68	-	-	-
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,30	98,30	-	-	-
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,90	90,44	98,41	90,40	90,11	99,68
		2	APM SM Sederajat	67,88	66,43	97,86	66,36	66,43	100,11
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,18	405,56	0,74	0,05	1480,00
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	44,94	43,51	96,82	-	-	-
4	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74	73,25	98,99	-	-	-

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Data Capaian kinerja tersebut diatas menggambarkan bahwa :

1. Tujuan startegis meningkatnya derajat pendidikan dengan 2 (dua) indikator Pendukung yaitu: rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah

Perbandingan realisasi indikator kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk tujuan strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah pada 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.18
Rata-Rata Lama Sekolah

No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	8.58	8.59	8.75	8.76	8.90
2	Indragiri Hulu	8.17	8.38	8.39	8.40	8.42
3	Indragiri Hilir	7.22	7.23	7.24	7.26	7.31
4	Pelalawan	8.49	8.50	8.70	8.72	8.73
5	Siak	9.65	9.66	9.86	9.87	9.88
6	Kampar	9.25	9.26	9.27	9.39	9.40
7	Rokan Hulu	8.38	8.39	8.54	8.55	8.81
8	Bengkalis	9.41	9.69	9.70	9.71	9.73
9	Rokan Hilir	8.24	8.25	8.26	8.28	8.52
10	Kepulauan Meranti	7.51	7.70	7.84	7.88	7.99
11	Pekanbaru	11.43	11.68	11.92	11.93	11.94
12	Dumai	9.85	10.07	10.14	10.15	10.16
	RIAU	**9.03**	**9.14**	**9.19**	**9.22**	**9.32**

sumber data : BPS Provinsi Riau

Dari tabel diatas tren pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2019 sebesar 9,03 dan tahun 2020 sebesar 9,14 dengan rasio peningkatan sebesar 0,11 dari tahun 2019. Realisasi untuk tahun 2022 sebesar 9,22 meningkat 0.03 dari tahun 2021 sebesar 9,19. Realisasi untuk tahun 2023 sebesar 9,32 meningkat 0,1 dari tahun 2022 sebesar 9,22.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian Harapan Lama Sekolah pada 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.19
Harapan Lama Sekolah

No	Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	13.32	13.33	13.34	13.36	13.37
2	Indragiri Hulu	12.35	12.36	12.46	12.58	12.59
3	Indragiri Hilir	11.90	11.91	11.93	12.19	12.20
4	Pelalawan	12.17	12.24	12.41	12.68	12.90
5	Siak	12.75	12.76	12.81	12.85	12.86
6	Kampar	13.45	13.46	13.55	13.59	13.60
7	Rokan Hulu	12.83	12.84	12.85	12.86	12.88
8	Bengkalis	12.86	12.87	12.88	13.16	13.34
9	Rokan Hilir	12.67	12.68	12.76	12.83	12.88
10	Kepulauan Meranti	12.81	12.82	12.83	12.84	12.86
11	Pekanbaru	15.37	15.54	15.55	15.56	15.58
12	Dumai	13.10	13.12	13.31	13.32	13.33
	RIAU	**13.14**	**13.20**	**13.28**	**13.29**	**13.30**

sumber data : BPS Provinsi Riau

Dari tabel diatas tren pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2019 sebesar 13,14 dan tahun 2020 sebesar 13,20 dengan rasio peningkatan sebesar 0,06 dari tahun 2019. Realisasi untuk tahun 2022 sebesar 13,29 meningkat 0.03 dari tahun 2021 sebesar 13,28. Realisasi untuk tahun 2023 sebesar 13,30 meningkat 0,01 dari tahun 2022 sebesar 13,29

2. Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan dengan 3(tiga) indikator pendukung yaitu APK SM Sederajat, APM SM Sederajat dan Angka Putus Sekolah SM sederajat. Realisasi kinerja tahun 2023 APK SM Sederajat sebesar 90,44% dengan Target 91,90%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah sebagai berikut :

a. APK SM sederajat

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan trend pencapaian angka partisipasi Kasar SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator KinerjaAPK SM sederajat

Indikator Kinerja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APK SM Sederajat	82,54	86,65	88,91	90,11	90,44

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.20 diatas tren pencapaian Angka Partisipasi Kasar SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2019 sebesar 82,54%, tahun 2020 sebesar 86,65% dengan rasio peningkatan sebesar 4,11% dari tahun 2019. Realisasi untuk tahun 2021 sebesar 88,91% meningkat sebesar 2,26% dari tahun 2020 sebesar 86,65%. Realisasi untuk tahun 2023 sebesar 90,44% meningkat sebesar 0,33% dari tahun 2022 sebesar 90,11%

b. APM SM Sederajat

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian Angka Partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.21
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja APM SM Sederajat

Indikator Kinerja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APM SM Sederajat	63,81	6,86	66,02	6,43	66,43

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel diatas tren pencapaian Angka Partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2019 sebesar 63,81%, tahun 2020 sebesar 66,86% dengan rasio peningkatan sebesar 3,05% dari tahun 2019. Realisasi untuk tahun 2021 sebesar 66,02%mengalami penurunan 0,84% dari tahun 2020 sebesar 66,86%. Realisasi untuk tahun 2022 sebesar 66,43% mengalami kenaikan sebesar 0,41% dari tahun 2021 sebesar 66,02% sedangkan untuk reliasasi tahun 2023 sebesar 66,43% tidak mengalami kenaikan dan cendrung sama dengan tahun 2022 66,43%

c. Angka Putus Sekolah SM Sederajat

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.22
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator KinerjaAngka Putus Sekolah SM sederajat

Indikator Kinerja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Putus Sekolah SM Sederajat	1,34	0,76	0,94	0,05	0,18

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.22 diatas trend pencapaian Angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Realisasi Angka Putus Sekolah untuk tahun 2019 sebesar 1,34%, tahun 2019 sebesar 0,76% dengan rasio penurunan sebesar 0,58% dari tahun 2019. Realisasi Angka Putus Sekolah untuk tahun 2021 sebesar 0,94% Mengalami peningkatan sebesar 0,18% dari tahun 2020 sebesar 0,76%. Di Tahun 2022 Angka Putus Sekolah Mengalami penuruanan sebesar 0,89%, tahun 2023 sebesar 0.18% mengalami peningkatan sebesar 0,13% dari tahun 2022 sebesar 0,05%. Indikator Angka Putus Sekolah semakin kecil semakin baik dalam mencerminkan partisipasi sekolah siswa dan meningkatan akses pendidikan menengah.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi.

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan trend pencapaian Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.23
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A

Indikator Kinerja	Tahun	
	2022	2023
Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	43,94	43,51

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.23 diatas tren pencapaian Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A Provinsi Riau pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan penurunan pencapaian tahunnya. Realisasi pencapaian Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A untuk tahun 2022 sebesar 43,94%, tahun 2023 sebesar 43,51% dengan rasio penurunan sebesar 0,43% dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk Sasaran strategis Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.24
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Indikator Kinerja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	66,92	67,08	72,12	72,33	73,25

Jika dibandingkan dengan Capaian dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengalami peningkatan. Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

dikarenakan adanya evaluasi internal dan tindak lanjut terhadap laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP.

3.1.3 Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target perjanjian kinerja 2023	Target Renstra 2023	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		4		5	6
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,29-9,35	9,32	99,68
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,44-13,53	13,30	98,30
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,90	91,90	90,44	98,41
		2	APM SM Sederajat	67,88	67,88	66,43	97,86
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,73	0,18	24,66
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A		44,94	-	43,51	-
4	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		74	-	73,25	-

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.25 diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat dengan 2 (dua) indikator pendukung yaitu Rata – Rata Lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian terhadap target renstra 2023 adalah sebagai berikut:

a. Rata – Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah untuk realisasi tahun 2023 sebesar 9,32 dengan target Renstra tahun 2023 sebesar 9,29-9,35 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 99,68 persen.

b. Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah untuk realisasi tahun 2023 sebesar 13,30 dengan target Renstra tahun 2023 sebesar 13,44-13,53 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 98,30 persen.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pendidikan dengan 3 (tiga) indikator pendukung yaitu APK SM sederajat, APM SM sederajat dan Angka Putus Sekolah SM sederajat. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian terhadap target renstra 2023 adalah sebagai berikut :

a. APK SM sederajat

Indikator Kinerja APK SM sederajat untuk realisasi tahun 2023 sebesar 90,44 dengan target Renstra tahun 2023 sebesar 91,90 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 98,41persen.

b. APM SM sederajat

Indikator Kinerja APM SM sederajat untuk realisasi tahun 2023 sebesar 90,44 dengan target Renstra tahun 2023 sebesar 91,90 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 98,41persen

c. Angka Putus Sekolah SM sederajat

Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah SM sederajat untuk realisasi

tahun 2023 sebesar 0,18 dengan target Renstra tahun 2023 sebesar 0,73 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 24,66 persen.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian terhadap target renstra tahun 2023 dengan indikator Pendukung Persentase SMA dan SMK yang berakredtasi A.

   Terdapat Perbedaan Indikator Kinerja target Renstra 2023 dengan target perjanjian kinerja 2023 setelah hasil evaluasi oleh MENPANRB sehingga tidak dapat diukur terhadap realisasi kinerja dan capaian.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai SAKIP dinas Pendidikan Provinsi Riau

   Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian terhadap target renstra tahun 2023 dengan indikator Pendukung Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

   Terdapat penambahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja target perjanjian kinerja 2023 setelah hasil evaluasi oleh MENPANRB dan tidak ada pada target Renstra tahun 2023. sehingga tidak dapat diukur capaiannya.

   Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2024:

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Akhir Renstra Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target perjanjian kinerja 2023	Target Akhir Renstra 2024	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		4		5	6
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,35-9,40	9,32	99,68
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,44-13,60	13,30	98,96
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,90	92,40	90,44	97,88
		2	APM SM Sederajat	67,88	68,00	66,43	97,69
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,7	0,18	388,89
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A		44,94	-	43,51	-
4	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		74	-	73,25	-

Dari tabel 3.26 diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat dengan 2 (dua) indikator pendukung yaitu Rata – Rata Lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian terhadap target akhir renstra tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Rata – Rata Lama Sekolah

      Indikator Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah untuk realisasi tahun 2023 sebesar 9,32 dengan target Akhir Renstra tahun 2024 sebesar 9,35-9,40 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 99,68 persen.

b. Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah untuk realisasi tahun 2023 sebesar 13,30 dengan target Akhir Renstra tahun 2024 sebesar 13,44-13,60 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 98,96 persen.

2 Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pendidikan dengan 3 (tiga) indikator pendukung yaitu APK SM sederajat, APM SM sederajat dan Angka Putus Sekolah SM sederajat. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian terhadap target renstra 2023 adalah sebagai berikut :

a. APK SM sederajat

Indikator Kinerja APK SM sederajat untuk realisasi tahun 2023 sebesar 90,44 dengan target Akhir Renstra tahun 2024 sebesar 92,40 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 97,88 persen.

b. APM SM sederajat

Indikator Kinerja APM SM sederajat untuk realisasi tahun 2023 sebesar 90,44 dengan target Akhir Renstra tahun 2024 sebesar 68,00 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 97,69 persen

c. Angka Putus Sekolah SM sederajat

Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah SM sederajat untuk realisasi tahun 2023 sebesar 0,18 dengan target Akhir Renstra tahun 2024 sebesar 0,7 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 388,89 persen.

3 Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian terhadap target

Akhir Renstra tahun 2024 dengan indikator Pendukung Persentase SMA dan SMK yang berakredtasi A.

Terdapat Perbedaan Indikator Kinerja target Akhir Renstra 2024 dengan target perjanjian kinerja 2023 setelah hasil evaluasi oleh MENPANRB sehingga tidak dapat diukur terhadap realisasi kinerja dan capaian.

4 Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai SAKIP dinas Pendidikan Provinsi Riau

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian terhadap target Akhir Renstra tahun 2024 dengan indikator Pendukung Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Terdapat penambahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja target perjanjian kinerja 2023 setelah hasil evaluasi oleh MENPANRB dan tidak ada pada target Akhir Renstra tahun 2024. sehingga tidak dapat diukur capaiannya.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Data capaian kinerja sasaran Strategis meningkatnya Akses Pendidikan yang dapat dibandingkan dengan Nasional adalah indicator APK SM sederajat dimana target perjanjian Kinerja Tahun 2023 Mendikbudristek adalah sebagai berikut:

Tebal 3.27

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Nasional 2023
1	2	3		4	5	
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,32	8,77
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,30	13,15
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,90	90,44	97,38
		2	APM SM Sederajat	67,88	66,43	68,87
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,18	
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan		Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	44,94	43,51	
4	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74	73,25	

Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang sama dengan target Kinerja sasaran Program Kemendikbudristek adalah meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu di seluruh jenjang dengan target indikator kinerja sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/SMLB/ Sederajat sebesar 91,90%. Jika dilihat realisasi PK 2023 Disdik Provinsi Riau indicator APK SM sederajat telah melampaui target APK SM sederajat standar Nasional yaitu sebesar 90,44%, namum jika dilihat dari realisasi APK SM sederajat Nasional tahun 2023 sebesar 97,38%, APK SM sederajat Provinsi Riau

masih dibawah standar Nasional dengan rasio yaitu sebesar 6,48%. Berikut adalah trend capaian APK SM sederajat Provinsi dan Nasional dan APM SM sederajat Provinsi dan Nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

a. APK (Angka Partisipasi Kasar)

berikut tabel dan grafik trend capaian Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau dan nasional 5 tahun terakhir

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Kasar

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APK SM Sederajat (Provinsi)	82,54	86,65	88,91	90,11	90,44
APK SM Sederajat (Nasional)	88,55	92,92	95,53	97,52	97,38

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.7
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Kasar



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Tabel dan grafik tersebut mengambarkan hal – hal sebagai berikut:

1. APK SM sederajat baik Provinsi maupun Nasional Mengalami Kenaikan pada tahun 2019 hingga tahun 2023.
2. APK SM Provinsi di tahun 2019 (82,54%) mengalami kenaikan sebesar 4,11%, dari tahun 2020 (86,65) APK SM Provinsi di tahun 2021 (88,91%) Mengalami kenaikan sebesar (1,2%) dari tahun 2022 (90,11%) dan APK SM Sederajat Provinsi di tahun 2023 (90,44%) mengalami kenaikan sebesar (0,33%)
3. APK SM Nasional tahun 2019 (88,55%) ditahun 2020 mengalami kenaikan sebesar (4,37%) ditahun 2021 (95,53%) mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar (1,99%) dan ditahun 2023 APK SM Nasional sebesar (97,38%)
4. Pada Tahun 2023 Rata –Rata APK SM sederajat Provinsi (87,73%) masih dibawah APK SM sederajat Nasional (94,38%) terdapat selisih (6,65%)

b. APM (Angka Partisipasi Murni)

berikut tabel dan grafik trend capaian Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau dan nasional 5 tahun terakhir

Tabel 3.29
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Murni

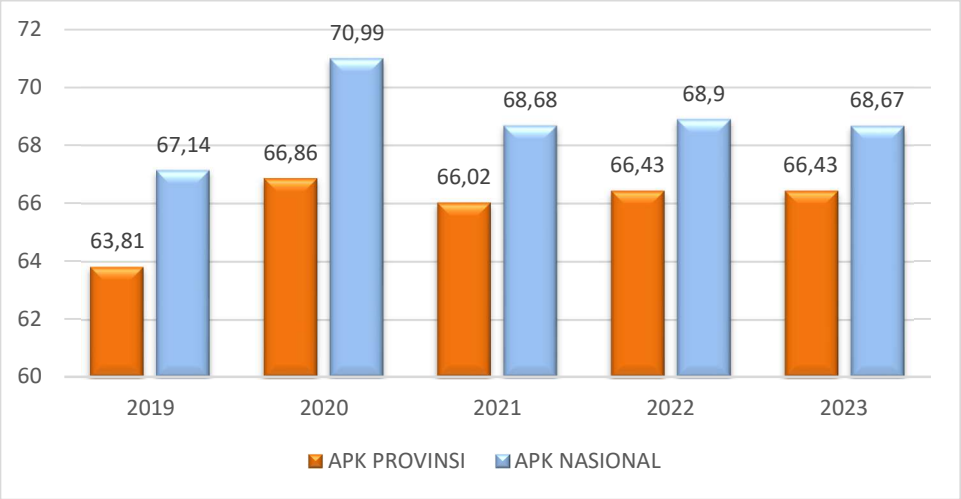
Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APM SM Sederajat (Provinsi)	63,81	66,86	66,02	66,43	66,43
APM SM Sederajat (Nasional)	67,14	70,99	68,68	68,9	68,67

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.8

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Angka Partisipasi Murni



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Tabel dan grafik tersebut mengambarkan hal – hal sebagai berikut:

1. APM SM sederajat baik Provinsi maupun Nasional Mengalami Kenaikanpada tahun 2019 hingga tahun 2023.
2. APM SM Sederajat Provinsi di tahun 2019 (63,81%) mengalami kenaikan sebesar (3,05%), dari tahun 2020 (66,86%) APM SM sederajat Provinsi di tahun 2021 (66,02%) Mengalami Penurunan sebesar (-0,41%) dari tahun 2022 (66,43%) dan APM SM Sederajat Provinsi di tahun 2023 (66,43%) dan cendrung sama dengan tahun 2022
3. APM SM Sederajat Nasional mengalami Penurunan di tahun 2023
4. APM SM Sederajat Nasional tahun 2018 (63,70%) ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar (3,14%) ditahun 2020 (70,99%) mengalami Penurunan pada tahun 2021 sebesar (-2,31%) dan ditahun 2022 APM SM Sederajat Nasional sebesar (86,90%)
5. Pada Tahun 2022 Rata –Rata APM SM Provinsi (64,66%) masih dibawah APM SM Nasional (67,88%) terdapat selisih (3,22%)

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,32	99,68
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,30	98,3
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,90	90,44	98,41
		2	APM SM Sederajat	67,88	66,43	97,86
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,18	405,56
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan		Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	44,94	43,51	96,82
4	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74	73,25	98,99

A. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

(1). INDIKATOR 1 dan 2: **Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS)**

a. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan, Peningkatan Mutu/Kualitas

Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah dan tidak pernah sekolah serta Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah
2. Kurangnya minat masyarakat mengikuti Pendidikan Kesetaraan
3. Akses Pendidikan bagi masyarakat yang jauh atau belum terpenuhi
4. Tingginya biaya Pendidikan

B. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Riau.

1. Meningkatkan Daya Tampung Sekolah melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) serta merehabilitasi ruang kelas yang rusak
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan untuk Sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C) yang merupakan kewenangan dari Pemkab/Pemkot.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
4. Memberikan Beasiswa Siswa SMA sederajat untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan mengurangi biaya personal siswa

dengan Pemberian Bantuan Biaya Personal ke Lembaga Pendidikan SMA, SMK dan SLB melalui Dana BOSDA serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

(2). INDIKATOR 1 dan 2 : APK dan APM SM sederajat

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas PendidikanProvinsi Riau

Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Kurangnya daya tampung Sekolah Menengah untuk lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke Pendidikan Menengah dan bertambahnya jumlah penduduk
2. Belum tepatnya/alih fungsi sarana prasarana pendidikan di sekolah
3. Masih banyaknya sarana Prasarana Pendidikan dalam Kondisi Rusak
4. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau.
5. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan
6. Terbatasnya Anggaran Daerah.

C. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Membangun Unit Sekolah Baru (USB) pada tahun 2023 sebanyak 14 sekolah SMA dan 4 sekolah SMK dan menambah Ruang Kelas Baru (RKB) SMA pada tahun 2023 sebanyak 23 ruang dan SMK 52 ruang dan Pengadaan Mebel Sekolah SMA 158 Paket
2. Merehabilitasi Ruang Kelas yang rusak SMA 21 ruang dan SMK 3 sekolah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dibeberapa daerah. Untuk tahun 2023 SMATER memiliki 12 TKB dan 1.024 siswa
4. Pemenuhan akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran
5. Meningkatkan perolehan penerimaan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat

3.1.5.2 INDIKATOR 3 : Angka Putus Sekolah SM Sederajat

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas PendidikanProvinsi Riau

Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT), Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Faktor Ekonomi

   Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak dan membuat anak memilih untuk bekerja. Meskipun bagi sekolah Negeri telah bebas pungutan/gratis namun mereka masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi perlengkapan belajar (tas, sepatu dan seragam sekolah) dan biaya untuk transportasi, uang jajan sehari-hari dan membeli buku tulis.

2. Pernikahan Usia Muda

   Merupakan Budaya dibeberapa daerah menikahkan anak pada usia dini dan kurangnya perhatian orang tua sehingga terjadi pergaulan bebas.

3. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai

   Fasilitas pembelajaran di sekolah yang kurang memadai seperti fasilitas yang tersedia (alat, bahan dan media), buku pelajaran dan sebagainya merupakan faktor ketiga penyebab anak putus sekolah. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah. Meskipun bagi sekolah Negeri telah bebas pungutan/gratis namun mereka masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi perlengkapan belajar (tas, sepatu dan seragam sekolah) dan biaya untuk transportasi, uang jajan sehari-hari dan membeli buku tulis.

4. Kurang perhatian orang tua

   Kurangnya perhatian orang tua merupakan faktor kedua penyebab anak putus sekolah. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua anak, sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5. Minat anak/Kenakalan Remaja

   Rendahnya Minat Anak dapat di sebabkan Oleh Perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang Jauh, Fasilitas belajar yang kurang dan Pengaruh Lingkungan Sekitarnya dan melakukan Kenakalan Remaja dan cenderung malas dalam mengikuti pelajaran dan pada akhirnya dikeluarkan oleh pihak sekolah atau berhenti dan tidak menyelesaikan sekolahnya.

6. Budaya

   Budaya adalah hal-hal yang terkait dengan kebiasaan masyarakat sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya arti pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa sekolahpun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang tidak bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak, maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak anak banyak rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk

membantu orang tua dalam mencari nafkah.

7. Lokasi Sekolah

   Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh, akses yang sangat sulit dan keselamatan pun dianggap perlu dipertimbangkan.

8. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan optimalisasi dalam penggunaannya dengan kebijakan tidak ada pungutan oleh sekolah kepada siswa di Sekolah Negeri dan subsidi pembebasan/pengurangan biaya pada siswa tidak mampu di sekolah swasta
2. Pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT) untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa untuk bersekolah baik bersekolah di Negeri maupun swasta. Untuk bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT) Tahun 2023 akan diberikan sebanyak 4.450 Siswa dan diharapkan akan semakin menurunnya angka putus sekolah karena faktor ekonomi.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB), sehingga anak-anak yang menjadi tulang punggung

keluarga dan jarak sekolah yang jauh karena faktor geofrafis tetap bisa belajar karena menggunakan pelayanan khusus. SMA Terbuka (SMATER) Tahun 2023 memiliki 12 TKB dan 1.024 Siswa dan akan dimungkinkan menambah Tempat Kegiatan Belajar.

3.1.5.3 INDIKATOR 4 : Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan pendidikan Khusus yang Terakreditasi

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas PendidikanProvinsi Riau

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Penguatan kelembagaan atau satuan pendidikan oleh Pengawas Pendidikan

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Adanya Penambahan Sekolah baru berdiri belum dapat diakreditasi dan belum memenuhi syarat yaitu SMA Swasta 8 Sekolah dan SMK Swasta 4 sekolah.
2. Ada 25 SMA/SMK negeri dan swasta itu tidak lulus akreditasi karena syarat automasi perpanjangan status akreditasi tidak lengkap dan merupakan Kelalaian dari pihak kepala sekolah dan jajaran manajemen yang ada di SMA/SMK negeri dan swasta yang tidak melengkapi data perpanjangan akreditasi sekolah mendaftar secara online, dan meng-uploud data-data sesuai dengan persyaratan yang tertulis di Isian Akreditasi Satuan

Pendidikan (IASP) melalui aplikasi yang telah dikirimkan oleh BAN. Ada 23 SMA/SMK yang belum terverifikasi oleh pihak BAN dan sekolah yang terindikasi tutup tidak memiliki siswa.

3. Sinergi antara BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan belum optimal.

4. Keterlambatan penyelesaian administrasi akreditasi dari satuan Pendidikan.

5. Masa berlakunya Akreditasi yang sudah habis, tetapi belum diakreditasi kembali oleh BAN-SM.

6. Kompetensi staf pada tingkat satuan pendidikan dalam membuat evaluasi diri sekolah (EDS) masih kurang.

7. Kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan masih kurang.

1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.1 INDIKATOR Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

A. Catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya mengambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)

b. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat memberikan

informasi tentang hubungen kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)

c. Setiap Unit/satuan kerja pada bidang/bagian belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan

2. Pengukuran Kinerja

   Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menginput aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkata oleh Perangkat Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

3. Pelaporan Kinerja

   Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

   a. Dalam peningkatan implementasi SAKIP belum sepenuhnya melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP

   b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

c. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

B. Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

1. Perencanaan Kinerja
   a. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
   b. Menyusun Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
   c. Setiap unit/satuan kerja pada bidang/bagian memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
2. Pengukuran Kinerja

   Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
3. Pelaporan Kinerja

-

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP
   b. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh

APIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

c. Memanfaatkan Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

a. Telah menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)

b. Telah menyusun Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)

c. Setiap unit/satuan kerja pada bidang/bagian telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

2. Pengukuran Kinerja Telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang melalui Rapat Kerja

3. Pelaporan Kinerja

-

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Telah Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP

b. Telah Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

oleh APIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

c. Telah Memanfaatkan Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.31
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7*100%
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,32	99,68	1.312.388.329.545	1.277.630.088.645	97,35
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,3	98,3	1.312.388.329.545	1.277.630.088.645	97,35
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,9	90,44	98,41	334.675.197.267	325.389.374.356	97,23
		2	APM SM Sederajat	67,88	66,43	97,86	334.675.197.267	325.389.374.356	97,23
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,18	405,56	894.187.011.130	877.742.821.154	98,16
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan		Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	44,94	43,51	96,82	84.026.114.837	74.497.893.135	88,66
4	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74	73,25	98,99	1.205.000.745.953	1.168.914.843.413	97,01

Dari Tabel 3.31 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tujuan strategis meningkatnya derajat pendidikan masyarakat terdapat 2 (dua) indikator Kinerja yang mendukung yaitu Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. Rata- rata lama sekolah capaian kinerjanya tidak tercapai 100% (99,68%) dengan penggunaan anggaran 97,35%. Capaian Kinerja Harapan lama Sekolah tidak tercapai 100% (98,30%) dengan penggunaan anggaran 97,35%.
2. sasaran strategis Meningkatnya Akses Pendidikan terdapat 3 (tiga) indikator Kinerja mendukung yaitu APK SM Sederajat, APM SM sederajat dan Angka Putus sekolah Indikator. APK SM sederajat capaian kinerjanya tidak tercapai 100% dengan penggunaan Anggaran 97,23%. Sedangkan Kinerja APM SM sederajat dan Angka Putus Sekolah SM sederajat capaian kinerja nya melebihi target sampai 100% dan penyerapan anggarannya dapat ditekan kurang dari 100% dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien.
3. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan, capaian Kinerjanya tidak tercapai 100% dengan penggunaan anggaran 88,66% sehingga belum bisa dikatakan efisien karena target kinerjanya tidak tercapai. Analisis efisiensi dilakukan bila capaian kinerja mencapai target yang telah ditentukan dengan penggunaan anggaran kurang dari anggaran yang tersedia.
4. Sasaran strategis Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan indikator Kinerja yang mendukung adalah Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan capaian kinerjanya tidak tercapai 100 % (98,99)% dengan penggunaan anggaran 97,01%.

Tebel 3.32

Efisensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	405,56	98,17	308,39

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya akses Pendidikan cukup baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SM sederajat sebesar 405,56% dapat tercapai dengan serapan anggaran 98,17% dengan tingkat efisiensi mencapai 308,39%.

3.1.1 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.33

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1 APK SM Sederajat	91,90	90,44	98,41	**Program Pengelolaan Pendidikan**							
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA					**110.472.891.430**	**108.163.441.401**	**97,91**
						Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah sekolah yang dibangun	11 Unit	13 Unit	118,18	22.186.378.216	22.139.234.616	**99,79**
						Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas baru yg dibangun	26 ruang	25 ruang	96,15%	11.553.024.693	11.337.970.891	**98,14**
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg di bangun	1 ruang	2 ruang	200,00%	1.180.073.820	1.171.996.735	**99,32**
						Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	jumlah Ruang Laboratorium Biologi yg dibangun	1 ruang	1 ruang	100,00	3.504.829.573	3.475.202.850	**99,15**
						Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	jumlah Ruang Laboratorium Fisika yg di bangun	1 ruang	1 ruang	100,00	4.311.529.947	4.226.912.100	**98,04**
						Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	jumlah Ruang Laboratorium Kimia yg dibangun	2 ruang	11 ruang	550,00	5.151.133.915	5.134.977.517	**99,69**
						Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	jumlah Ruang Laboratorium Komputer yg dibangun	1 ruang	1 ruang	100,00	2.445.511.834	2.429.434.181	**99,34**
						Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Labroratorium bahasa yg dibangun	1 ruang	1 ruang	100,00	470.580.000	468.737.935	**99,61**
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit kesehatan sekolah yg di bangun	1 ruang	12 ruang	1200,00	3.399.454.209	3.359.365.420	**98,82**
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibangun	1 ruang	1 ruang	100,00	496.324.789	495.115.179	**99,76**
						Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	jumlah ruang serba guna/aula yg di bangun	1 ruang	1 ruang	100,00	889.317.981	879.525.090	**98,90**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pembangunan Asrama Sekolah	jumlah Asrama sekolah yang dibangun	1 Unit	1 unit	100,00	2.137.293.166	2.105.161.681	**98,50**
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	2 Unit	132 unit	6600,00	26.213.149.911	25.782.729.257	**98,36**
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru,penjaga sekolah yang dibangun	1 Unit	1 unit	100,00	345.683.043	331.491.550	**95,89**
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang sedang/berat yang di rehabilitasi	2 ruang	37 ruang	1850,00	9.201.615.297	8.736.731.990	**94,95**
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	6 ruang	600,00	8.767.390.898	8.687.851.303	**99,09**
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah laboratorium biologi yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	558.036.250	322.421.990	**57,78**
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah laboratorium Fisika yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	552.686.265	321.270.415	**58,13**
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah laboratorium Kimia yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	203.561.810	200.332.000	**98,41**
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah laboratorium Komputer yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	477.345.683	309.526.070	**64,84**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah laboratorium Bahsa yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	195.479.325	194.182.950	**99,34**
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	371.612.010	366.404.829	**98,60**
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/Aula yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1ruang	2 ruang	200,00	384.372.255	382.338.290	**99,47**
						Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	3 Unit	2 Unit	66,67	3.999.474.955	3.873.927.396	**96,86**
						Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang diRehabilitasi	1 unit	6 unit	600,00	1.319.444.775	1.292.003.166	**97,92**
						Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru,penjaga sekolah yang direhablitasi	1 unit	1 Unit	100,00	157.586.810	138.596.000	**87,95**
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					**93.209.905.858**	**91.734.633.018**	98,42
						Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah sekolah yang dibangun	3 Unit	4 Unit	133,33	**31.923.924.233**	**31.860.617.733**	99,80
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang Praktek siswa yg dibangun	13 Ruang	51 Ruang	392,31	**22.074.453.000**	**21.891.624.871**	99,17
						Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang praktek siswa yg dibangun	1 ruang	16 Ruang	1600,00	**20.137.335.000**	**19.764.592.832**	98,15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg dibangun	5 Unit	47 Unit	940,00	**11.751.118.628**	**11.414.477.699**	97,14
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas Kepala sekolah,guru dan penajaga sekolah yg dibangun	1 Unit	2 Unit	200,00	**753.102.000**	**728.182.170**	96,69
						Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kepala sekolah yang di rehabilitasi	2 Ruang	3 Ruang	150,00	**2.044.031.700**	**1.681.538.274**	82,27
						Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/ Kepala sekolah/TU yang di rehabilitasi	1 Ruang	3 Ruang	300,00	**3.311.518.300**	**3.212.411.930**	97,01
						Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang Praktek siswa yang di rehabilitasi	1 Ruang	2 Ruang	200,00	**537.928.000**	**527.730.260**	98,10
						Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**187.669.999**	**184.875.100**	98,51
						Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama sekolah yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00	**488.824.998**	**468.582.149**	95,86
						Pengelolaan Pendidikan Khusus					**6.917.488.225**	**6.355.354.925**	91,87
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	4 Ruang	4 Ruang	100,00	**774.999.650**	**765.338.910**	98,75
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg di bangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	**477.420.000**	**204.965.940**	42,93
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yg dibangun	3 Ruang	3 Ruang	100,00	**477.840.000**	**473.820.000**	99,16
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah ruang pustaka yg dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**177.600.000**	**177.600.000**	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah ruang sarasa prasarana dan utilitas yg dibangun	10 Unit	10 Unit	100,00	**2.627.536.910**	**2.377.437.869**	90,48
						Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	jumlah ruang orientasi dan mobilitas yg dibangun	2 Ruang	2 Ruang	100,00	**562.909.200**	**549.110.800**	97,55
						Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	jumlah ruang bina persepsi bunyi dan irama untuk tunarungu (B) yang dibangun	1 Ruang	1 Ruang	200,00	**155.400.000**	**155.400.000**	100,00
						Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	jumlah ruang Bina diri untuk tunarungu © yang dibangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	**774.270.000**	**769.927.500**	99,44
						Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas yang di rehabilitasi	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**197.037.500**	**195.991.950**	99,47
						Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg direhabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	**196.400.000**	**194.889.042**	99,23
						Rehabilitasi Asrama Sekolah	jumlah asrama yang sekolah yang di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00	**301.520.000**	**297.864.488**	98,79
						Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehabilitasi	1 unit	1 unit	100,00	**194.554.965**	**193.008.426**	99,21
		2 APM SM Sederajat	67,88	66,43	97,86	Program Pengelolaan Pendidikan							
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA					**110.472.891.430**	**108.163.441.401**	**97,91**
						Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah sekolah yang dibangun	11 Unit	13 Unit	118,18	22.186.378.216	22.139.234.616	**99,79**
						Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas baru yg dibangun	26 ruang	25 ruang	96,15%	11.553.024.693	11.337.970.891	**98,14**
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg di bangun	1 ruang	2 ruang	200,00%	1.180.073.820	1.171.996.735	**99,32**
						Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	jumlah Ruang Laboratorium Biologi yg dibangun	1 ruang	1 ruang	100,00	3.504.829.573	3.475.202.850	99,15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	jumlah Ruang Laboratorium Fisika yg di bangun	1 ruang	1 ruang	100,00	4.311.529.947	4.226.912.100	98,04
						Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	jumlah Ruang Laboratorium Kimia yg dibangun	2 ruang	11 ruang	550,00	5.151.133.915	5.134.977.517	99,69
						Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	jumlah Ruang Laboratorium Komputer yg dibangun	1 ruang	1 ruang	100,00	2.445.511.834	2.429.434.181	99,34
						Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Labroratorium bahasa yg dibangun	1 ruang	1 ruang	100,00	470.580.000	468.737.935	99,61
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit kesehatan sekolah yg di bangun	1 ruang	12 ruang	1200,00	3.399.454.209	3.359.365.420	98,82
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibangun	1 ruang	1 ruang	100,00	496.324.789	495.115.179	99,76
						Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	jumlah ruang serba guna/aula yg di bangun	1 ruang	1 ruang	100,00	889.317.981	879.525.090	98,90
						Pembangunan Asrama Sekolah	jumlah Asrama sekolah yang dibangun	1 Unit	1 unit	100,00	2.137.293.166	2.105.161.681	98,50
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	2 Unit	132 unit	6600,00	26.213.149.911	25.782.729.257	98,36
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru,penjaga sekolah yang dibangun	1 Unit	1 unit	100,00	345.683.043	331.491.550	95,89
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang sedang/berat yang di rehabilitasi	2 ruang	37 ruang	1850,00	9.201.615.297	8.736.731.990	94,95

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	6 ruang	600,00	8.767.390.898	8.687.851.303	99,09
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah laboratorium biologi yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	558.036.250	322.421.990	57,78
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah laboratorium Fisika yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	552.686.265	321.270.415	58,13
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah laboratorium Kimia yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	203.561.810	200.332.000	98,41
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah laboratorium Komputer yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	477.345.683	309.526.070	64,84
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah laboratorium Bahsa yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	195.479.325	194.182.950	99,34
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	371.612.010	366.404.829	98,60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/Aula yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	1ruang	2 ruang	200,00	384.372.255	382.338.290	99,47
						Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang rusak sedang/berat yang di rehabilitasi	3 Unit	2 Unit	66,67	3.999.474.955	3.873.927.396	96,86
						Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang diRehabilitasi	1 unit	6 unit	600,00	1.319.444.775	1.292.003.166	97,92
						Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru,penjaga sekolah yang direhablitasi	1 unit	1 Unit	100,00	157.586.810	138.596.000	87,95
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					**93.209.905.858**	**91.734.633.018**	**98,42**
						Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah sekolah yang dibangun	3 Unit	4 Unit	133,33	**31.923.924.233**	**31.860.617.733**	99,80
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang Praktek siswa yg dibangun	13 Ruang	51 Ruang	392,31	**22.074.453.000**	**21.891.624.871**	99,17
						Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang praktek siswa yg dibangun	1 ruang	16 Ruang	1600,00	**20.137.335.000**	**19.764.592.832**	98,15
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg dibangun	5 Unit	47 Unit	940,00	**11.751.118.628**	**11.414.477.699**	97,14
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas Kepala sekolah,guru dan penajaga sekolah yg dibangun	1 Unit	2 Unit	200,00	**753.102.000**	**728.182.170**	96,69
						Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kepala sekolah yang di rehabilitasi	2 Ruang	3 Ruang	150,00	**2.044.031.700**	**1.681.538.274**	82,27

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/ Kepala sekolah/TU yang di rehabilitasi	1 Ruang	3 Ruang	300,00	**3.311.518.300**	**3.212.411.930**	97,01
						Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang Praktek siswa yang di rehabilitasi	1 Ruang	2 Ruang	200,00	**537.928.000**	**527.730.260**	98,10
						Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**187.669.999**	**184.875.100**	98,51
						Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama sekolah yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00	**488.824.998**	**468.582.149**	95,86
						Pengelolaan Pendidikan Khusus					**6.917.488.225**	**6.355.354.925**	91,87
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	4 Ruang	4 Ruang	100,00	**774.999.650**	**765.338.910**	98,75
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg di bangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	**477.420.000**	**204.965.940**	42,93
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yg dibangun	3 Ruang	3 Ruang	100,00	**477.840.000**	**473.820.000**	99,16
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah ruang pustaka yg dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**177.600.000**	**177.600.000**	100,00
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah ruang sarasa prasarana dan utilitas yg dibangun	10 Unit	10 Unit	100,00	**2.627.536.910**	**2.377.437.869**	90,48
						Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	jumlah ruang orientasi dan mobilitas yg dibangun	2 Ruang	2 Ruang	100,00	**562.909.200**	**549.110.800**	97,55
						Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	jumlah ruang bina persepsi bunyi dan irama untuk tunarungu (B) yang dibangun	1 Ruang	1 Ruang	200,00	**155.400.000**	**155.400.000**	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
													Rp	%
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
							Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	jumlah ruang Bina diri untuk tunarungu © yang dibangun	5 Ruang	5 Ruang	100,00	**774.270.000**	**769.927.500**	99,44
							Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas yang di rehabilitasi	1 Ruang	1 Ruang	100,00	**197.037.500**	**195.991.950**	99,47
							Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yg direhabilitasi	1 ruang	1 ruang	100,00	**196.400.000**	**194.889.042**	99,23
							Rehabilitasi Asrama Sekolah	jumlah asrama yang sekolah yang di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00	**301.520.000**	**297.864.488**	98,79
							Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehabilitasi	1 unit	1 unit	100,00	**194.554.965**	**193.008.426**	99,21
		1	Angka Putus Sekolah	0,73	0,18	405,56	Program Pengelolaan Pendidikan					**900.071.570.630**	**883.627.380.654**	**98,17**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA					**578.214.620.571**	**569.783.843.284**	**98,52**
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah yg	446 Satuan	446 Satuan	100,00%	**266.576.858.969**	**261.751.396.828**	**98,19**
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS SMA	892 Orang	892 Orang (100%)	100,00%	**311.637.761.602**	**308.032.446.456**	**98,84**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kejuruan					**296.012.560.929**	**288.221.470.073**	**97,17**
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS SMK	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan (100%)	100,00%	**170.890.657.929**	**168.275.301.506**	**98,47**
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS SMK	596 Orang	596 Orang (100%)	100,00%	**125.121.903.000**	**119.946.168.567**	**95,86**
							Pengelolaan Pendidikan Khusus					**25.844.389.130**	**25.622.067.297**	**99,33**
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	100,00%	**15.309.029.630**	**15.123.998.297**	**98,79**
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yg pelayanan BOS Pendidikan Khusus	94 orang	94 orang (100%)	100,00%	**4.650.800.000**	**4.613.509.500**	**99,20**
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik/SMATER)	Jumlah Sekolah yg menjalankan Program SMATER	47 satuan pendidikan	47 satuan pendidikan	100,00%	**5.884.559.500**	**5.884.559.500**	**100,00**
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	44,94	43,51	96,82	**Program Pengelolaan Pendidikan**					**201.806.696.611**	**12.623.286.509**	**6,26**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA					**71.154.505.755**	**64.271.330.547**	
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah ruang sekolah yg mendapatkan Mebel	23 Paket	87 Paket	378,26	24.013.761.585	21.559.815.680	**89,78**
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Paket Perlengkapan sekolah	1 Paket	0,00	0,00	186.574.687	0	**0,00**
						Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Paket alat Praktik dan peraga	1 paket	98 paket	9800,00	16.842.118.480	16.008.361.150	**95,05**
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Minat	446 Satuan Pendidikan	459 Satuan Pendidikan	102,91	16.556.426.306	14.383.765.666	**86,88**
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah orang yg mengikuti karir pendidik dan	1164 Peserta Didik	1164 Peserta Didik (100%)	100,00	6.210.404.687	5.872.443.801	**94,56**
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah orang yg mengikuti karir pendidik dan	4873 Orang	4837 Orang	99,26	5.619.394.987	4.801.987.573	**85,45**
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	jumlah Satuan Pendidikan yg memperolah	459 Satuan Pendidikan	456 Satuan Pendidikan	99,35	1.725.825.023	1.644.956.677	**95,31**
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK					**97.285.251.326**	**92.476.473.485**	
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah ruang sekolah yg mendapatkan Mebel	13 Paket	38 Paket	292,31	**17.248.614.260**	**17.054.186.096**	**98,87**
						Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Paket alat praktek dan peraga siswa	1 Paket	37 Paket	3700,00	**60.006.736.964**	**59.085.860.108**	**98,47**
						Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah siswa yg mengikuti proses belajar dan ujian bagi peserta didik	298 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	92,28	**14.926.170.456**	**12.065.499.892**	**80,83**
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan kreativitas siswa	336 peserta didik	336 peserta didik	100,00	**2.194.698.762**	**2.111.007.071**	**96,19**
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah orang yg mengikuti karir	2017 Orang	381 orang	18,89	**2.909.030.884**	**2.159.920.318**	**74,25**
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah Satuan Pendidikan yg	307 Satuan Pendidikan	307 Satuan Pendidikan	100,00	**899.861.680**	**799.779.290**	
						Pengelolaan Pendidikan Khusus					**32.658.249.593**	**30.879.433.014**	**94,55**
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah ruang sekolah yg mendapatkan Mebel	26 Paket	22 Paket	84,62	**1.214.297.575**	**1.050.474.600**	**86,51**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Paket Perlengkapan sekolah	2 Paket	3 Paket	150,00	**194.807.500**	**191.497.350**	**98,30**
						Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Paket alat praktek dan peraga siswa	24 Paket	21 Paket	87,50	**1.421.684.301**	**1.373.420.050**	**96,61**
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah siswa yg mengikuti proses belajar dan ujian bagi peserta didik	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	100,00	**21.207.393.485**	**20.073.023.189**	**94,65**
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan kreativitas siswa	406 Peserta Didik	406 Peserta Didik	100,00	**2.216.058.190**	**2.162.091.964**	**97,56**
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah orang yg mengikuti karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendiidkan Khusus	158 Orang	196 Orang	124,05	**6.326.841.995**	**5.952.926.761**	**94,09**
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100,00	**77.166.547**	**75.999.100**	**98,49**
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan					**708.689.937**	**651.143.420**	
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah orang yg mengikuti Pelatihan Penyusunan kurikulum muatan Lokal Pendidikan Menengah	763 Orang	96 orang (15,58%)	12,58	**708.689.937**	**651.143.420**	**91,88**
						Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi							
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satdik Menegah dan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	100,00	**253.299.804**	**194.536.416**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendistribusian Pendidik dan Tendik di satdik menengah dan Khusus	1 Laporan	1 Laporan (100%)	100,00	**133.769.792**	**112.300.977**	
						Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Perizinan Pendidikan Menengah dan diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen (100%)	100,00	**83.580.627**	**78.882.623**	
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan Menengah yg diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen (100%)	100,00	**72.992.372**	**69.479.450**	
						Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Perizinan Pendidikan Khusus dan diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen (100%)	100,00	**49.999.975**	**29.186.725**	
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan Khusus yg diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen (100%)	100,00	**60.168.152**	**51.179.506**	
	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74	73,25	98,99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**5.202.419.057**	**5.076.738.212**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	2.919.262.595,00	2.880.629.317,00	**98,68**
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100,00	2.283.156.462,00	2.196.108.895,00	**96,19**
						Administrasi Keuangan PerangkatDaerah					**1.181.315.744.726**	**1.147.202.761.417**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	8.196 orang/ Bulan	12.894 orang	157,32	1.181.315.744.726,00	1.147.202.761.417	**97,11**
						Administrasi Barang Milik Daerah pada					**365.749.725**	**343.650.230**	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	365.749.725,00	343.650.230,00	**93,96**
						Administrasi Umum PerangkatDaerah					**4.928.987.093**	**4.456.652.065**	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	9 Paket	100,00	99.989.345,00	99.920.535,00	**99,93**
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 Paket	51 Paket	92,73	2.176.231.365,00	1.962.758.940,00	**90,19**
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2080 Paket	12.971	623,61	453.500.000,00	316.971.800,00	**69,89**
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	18 Paket	29 Paket	161,11	535.075.010,00	421.173.049,00	**78,71**
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	460 Laporan	460 Laporan	100,00	1.664.191.373,00	1.655.827.741	**99,50**
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					**349.860.429**	**311.329.200**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Anggaran	Anggaran	
												Rp	%
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9	10	11	12	13	14=9/8x100%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	26 Unit	26 Unit	100,00	349.860.429,00	311.329.200	**88,99**
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					**8.402.717.439**	**7.339.240.974**	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan (100%)	100,00	2.013.667.088,00	1.787.744.184	**88,78**
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayaan umum kantor	223 Laporan	212 Laporan	95,07	6.389.050.351,00	5.551.496.790	**86,89**
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang					**2.142.092.617**	**2.038.989.809**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemerliharaan, biaya pemeliharaan pajak kendaraan	17 Unit	11 Unit	64,71	224.330.000,00	215.613.500	**96,11**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak dan perizinan	17 Unit	12 Unit	70,59	233.310.000,00	231.538.464	**99,24**
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	45 Unit	195 Unit	433,33	219.590.000,00	155.807.030	**70,95**
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	15 Unit	15 Unit	100,00	1.464.862.617,00	1.436.030.815,00	**98,03**

Dari tabel 3.33 diatas dapat dijelaskan bahwa Pada Indikator APK SM sederajat penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 82,22%. Pada Indikator APM SM Sederajat penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 82,22%. Pada Indikator Angka Putus Sekolah penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 73,45%. Pada Indikator Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 88,89%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD). Berikut Realisasi Anggaran dan penjelasannya :

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2023 terbagi 5 (lima) Program yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi, Program pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program pengendalian perizinan pendidikan Realisasi. pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi,

sehingga sampai dengan bulan Desember 2023 diperoleh capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan. Analisis efisiensi dan efektifitas merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2023 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Riau. Sedangkan untuk rincian realisasi masing-masing pelaksanaan program Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2023 dengan total realisasi jumlah sebesar Rp. 2.447.731.641.175,- dan realisasi jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.519.251.569.846,- dapat dilihat pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel. 3.34

Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.202.707.571.086,00	1.166.769.361.907,00	**97,01**
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.306.785.164.997,00	1.272.423.266.834,00	**97,37**
3	PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	708.689.937,00	651.143.420,00	**91,88**
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	387.069.596,00	306.837.393,00	**79,27**
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	266.741.126,00	228.728.304,00	**85,75**
6	CABANG DINAS WILAYAH I	1.426.846.071,00	843.004.728,00	**59,08**
7	CABANG DINAS WILAYAH II	2.400.198.497,00	2.192.474.060,00	**91,35**
8	CABANG DINAS WILAYAH III	2.032.371.787,00	1.825.416.856,00	**89,82**
9	CABANG DINAS WILAYAH IV	2.536.916.749,00	2.491.407.673,00	**98,21**
TOTAL		**2.519.251.569.846**	**2.447.731.641.175**	**97,16**

Sumber data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan disdik bulan desember 2023

Adapun penjelasan mengenai Realisasi anggaran, sebagai berikut :

1. Efisiensi Dana Meliputi:

   - Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
   - Efisiensi Dana Perjalanan Dinas
   - Efisiensi Dana Sisa Kontrak

2. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) dari target 26 ruang terealisasi 25 ruang hanya 1 ruang yang tidak terbangun.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran ini antara lain :

1. Menyusun aturan pola pelaksanaan kegiatan dengan mewajibkan kepada setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan lebih awal, kecuali kegiatan-kegiatan yang dengan jadwal/kalender event nasional.
2. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
3. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.
4. Melakukan percepatan penyiapan Dokumen untuk menghindari gagal lelang

   Melakukan Proses Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai jadwal

Tabel. 3.35

Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7*100%
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,32	99,68	1.312.388.329.545	1.277.630.088.645	97,35
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,3	98,3	1.312.388.329.545	1.277.630.088.645	97,35
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,9	90,44	98,41	334.675.197.267	325.389.374.356	97,23
		2	APM SM Sederajat	67,88	66,43	97,86	334.675.197.267	325.389.374.356	97,23
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,18	405,56	894.187.011.130	877.742.821.154	98,16
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan		Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	44,94	43,51	96,82	84.026.114.837	74.497.893.135	88,66
4	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74	73,25	98,99	1.205.000.745.953	1.168.914.843.413	97,01

Sumber data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan disdik bulan desember 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari tujuh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Ringkasan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35	9,32	99,68
		2	Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53	13,30	98,30
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	APK SM Sederajat	91,90	90,44	98,41
		2	APM SM Sederajat	67,88	66,43	97,86
		3	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73	0,18	405,56
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A		44,94	43,51	96,82
4	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau		74	73,25	98,99

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2023 yang diukur berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dan 4 (Empat) indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2023 adalah sebesar 93,05%, dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2022 atau tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2019-

2024, merupakan dasar berpijak bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk tahun berikutnya sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah Masih adanya kesenjangan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dikarenakan keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesulitan menjangkau lokasi pendidikan, Adanya Kesenjangan Jumlah Siswa akibat adanya Sistem Zonasi, Sulitnya pembangunan bangunan Sekolah pada daerah-daerah terpencil dan terbatasnya jumlah siswa yang bersekolah di Daerah Terpencil, Masih rendahnya Jumlah Tenaga Pendidik di Daerah-Daerah Terpencil. Solusi yang akan dilakukan di tahun depan untuk mengatasi kendala/permasalahan yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka), Penambahan Ruang Kelas Baru dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Sistem Zonasi, Pemenuhan Akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran, Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik.

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang yaitu

1. Untuk meningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan melalui Kebijakan membangun USB dan RKB dan Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas.

2. Untuk Meningkatkan Aksebiltas Layanan Pendidikan Melalui Kebijakan Pemenuhan operasional Sekolah dan Pendirian layanan khusus pendidikan (Sekolah menengah terbuka).
3. Untuk meningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik Melalui Kebijakan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi, Meningkatkan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Meningkatkan pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik.
4. Untuk meningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas Pendidikan melalui kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan layanan khusus.
5. Untuk meningkatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan melalui kebijakan Meningkatkan kerjasama pendidikan kejuruan dengan DUDI, Meningkatkan manajemen sekolah berbasis vokasi dan Meningkatkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan DUDI.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**100%**	**90,94%**	**106,76%**	**1.202.707.571.086**	**1.166.769.361.907**	**97,01%**
	Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** **Indikator : Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja Perangkat Daerah**		**7 Dokumen**	**100%**	**100,00%**	**5.202.419.057**	**5.076.738.212**	**97,58%**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	2.919.262.595	2.880.629.317	98,68%
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	2.283.156.462	2.196.108.895	96,19%
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** **Indikator : Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**157,00%**	**157,32%**	**1.181.315.744.726**	**1.147.202.761.417**	**97,11%**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.196 Orang	12.894 Orang	157,32%	1.181.315.744.726	1.147.202.761.417	97,11%
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** **Indikator : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD**		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**365.749.725**	**343.650.230**	**93,96%**
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	365.749.725	343.650.230	93,96%
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1 Dokumen**	**91,15%**	**92,61%**	**4.928.987.093**	**4.456.652.065**	**90,42%**
		Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah							
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	9 Paket	100,00%	99.989.345	99.920.535	99,93%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 Paket	51 Paket	100,00%	2.176.231.365	1.962.758.940	90,19%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.911	12.971	72,42%	453.500.000	316.971.800	69,89%
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32 Paket	29 Paket	90,63%	535.075.010	421.173.049	78,71%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460 Laporan	460 Laporan	100,00%	1.664.191.373	1.655.827.741	99,50%
	5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** **Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yag Disediakan**		**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**349.860.429**	**311.329.200**	**88,99%**

	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26 Unit	26 Unit	100,00%	349.860.429	311.329.200	88,99%
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**		**404 Orang**	**404 Orang**	**100,00%**	**8.402.717.439**	**7.339.240.974**	**87,34%**
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	2.013.667.088	1.787.744.184	88,78%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223 Laporan	212 Laporan	95,07%	6.389.050.351	5.551.496.790	86,89%
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**100%**	**87,78%**	**97,36%**	**2.142.092.617**	**2.038.989.809**	**95,19%**
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	100,00%	224.330.000	215.613.500	96,11%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	100,00%	233.310.000	231.538.464	99,24%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218 Unit	195 Unit	89,45%	219.590.000	155.807.030	70,95%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	15 Unit	100,00%	1.464.862.617	1.436.030.815	98,03%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			**63,64%**	**59,06%**	**90,98%**	**1.306.785.164.997**	**1.272.423.266.834**	**97,37%**
indikator :								
Angka partisipasi sekolah			80,03%	78,15%	97,65%			
Persentase anak berkubutuhan khusus yang mendapatkan Akses pendidikan			24,02%	20,35%	84,72%			
Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang terakreditasi Minimal B			86,88%	78,68%	90,56%			
1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** **Indikator : Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**		**94,47%**	**81,95%**	**86,75%**	**759.842.017.756**	**742.218.615.232**	**97,68%**
	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	12 Unit	12 Unit	100,00%	22.186.378.216	22.139.234.616	99,79%
	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	26 ruang	25 ruang	96,15%	11.553.024.693	11.337.970.891	98,14%
	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	7 ruang	7 ruang	100,00%	1.180.073.820	1.171.996.735	99,32%
	4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	1 ruang	1 ruang	100,00%	3.504.829.573	3.475.202.850	99,15%
	5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	1 ruang	1 ruang	100,00%	4.311.529.947	4.226.912.100	98,04%
	6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	1 ruang	1 ruang	100,00%	5.151.133.915	5.134.977.517	99,69%
	7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1 ruang	1 ruang	100,00%	2.445.511.834	2.429.434.181	99,34%
	8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	1 ruang	1 ruang	100,00%	470.580.000	468.737.935	99,61%
	9	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 ruang	2 ruang	100,00%	3.399.454.209	3.359.365.420	98,82%

		10	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 ruang	1 ruang	100,00%	496.324.789	495.115.179	99,76%
		11	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 ruang	1 ruang	100,00%	889.317.981	879.525.090	98,90%
		12	Pembangunan Asrama Sekolah	1 Unit	1 ruang	100,00%	2.137.293.166	2.105.161.681	98,50%
		13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	110 paket	109 paket	99,09%	26.213.149.911	25.782.729.257	98,36%
		14	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1 Unit	1 unit	100,00%	345.683.043	331.491.550	95,89%
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	39 ruang	39 ruang	100,00%	9.201.615.297	8.736.731.990	94,95%
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8 ruang	8 ruang	100,00%	8.767.390.898	8.687.851.303	99,09%
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	1 ruang	1 ruang	100,00%	558.036.250	322.421.990	57,78%
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	1 ruang	1 ruang	100,00%	552.686.265	321.270.415	58,13%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	1 ruang	1 ruang	100,00%	203.561.810	200.332.000	98,41%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	1 ruang	1 ruang	100,00%	477.345.683	309.526.070	64,84%
		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	1 ruang	1 ruang	100,00%	195.479.325	194.182.950	99,34%
		22	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 ruang	1 ruang	100,00%	371.612.010	366.404.829	98,60%
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	2 Unit	2 Unit	100,00%	384.372.255	382.338.290	99,47%
		24	Rehabilitasi Asrama Sekolah	2 Unit	2 Unit	100,00%	3.999.474.955	3.873.927.396	96,86%
		25	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 unit	6 unit	100,00%	1.319.444.775	1.292.003.166	97,92%
		26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2 unit	0 Unit	0,00%	157.586.810	138.596.000	87,95%
		27	Pengadaan Mebel Sekolah	83 Paket	87 Paket	104,82%	24.013.761.585	21.559.815.680	89,78%
		28	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Paket	0	0,00%	186.574.687	-	0,00%
		29	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	98 paket	98 paket	100,00%	16.842.118.480	16.008.361.150	95,05%
		30	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	122 Peserta Didik	122 Peserta Didik	100,00%	-	-	#DIV/0!

		31	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	459 Satuan Pendidikan	459 Satuan Pendidikan	100,00%	16.556.426.306	14.383.765.666	86,88%
		32	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1164 Peserta Didik	1164 Peserta Didik	100,00%	6.210.404.687	5.872.443.801	94,56%
		33	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4837 Orang	4837 Orang	100,00%	5.619.394.987	4.801.987.573	85,45%
		34	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	459 Satuan Pendidikan	456 Satuan Pendidikan	99,35%	1.725.825.023	1.644.956.677	95,31%
		35	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	446 Satuan Pendidikan	446 Satuan Pendidikan	100,00%	266.576.858.969	261.751.396.828	98,19%
		36	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	446 Satuan Pendidikan	446 Satuan Pendidikan	100,00%	311.637.761.602	308.032.446.456	98,84%
	2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** **Indikator : Persentase SMK yang berkareditasi**		**85,54%**	**75,24%**	**87,96%**	**487.407.579.793**	**473.232.355.866**	**97,09%**
		1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4 Unit	4 Unit	100,00%	31.923.924.233	31.860.617.733	99,80%
		2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	67 Ruang	67 Ruang	100,00%	22.074.453.000	21.891.624.871	99,17%
		3	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	15 ruang	17 Ruang	113,33%	20.137.335.000	19.764.592.832	98,15%
		4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	48 Unit	48 Unit	100,00%	11.751.118.628	11.414.477.699	97,14%
		5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2 Unit	2 Unit	100,00%	753.102.000	728.182.170	96,69%
		6	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	11 Ruang	13 Ruang	118,18%	2.044.031.700	1.681.538.274	82,27%
		7	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5 Ruang	3 Ruang	60,00%	3.311.518.300	3.212.411.930	97,01%
		8	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	2 Ruang	2 Ruang	100,00%	537.928.000	527.730.260	98,10%
		9	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	100,00%	187.669.999	184.875.100	98,51%
		10	Rehabilitasi Asrama Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	100,00%	488.824.998	468.582.149	95,86%
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	38 Paket	42 Paket	110,53%	17.248.614.260	17.054.186.096	98,87%
		12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	53 Paket	53 Paket	100,00%	60.006.736.964	59.085.860.108	98,47%
		13	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	298 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	92,28%	14.926.170.456	12.065.499.892	80,83%
		14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	336 peserta	336 peserta	100,00%	2.194.698.762	2.111.007.071	96,19%

		15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2017 Orang	381 orang	18,89%	2.909.030.884	2.159.920.318	74,25%
		16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	307 Satuan Pendidikan	307 Satuan Pendidikan	100,00%	899.861.680	799.779.290	88,88%
		17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	100,00%	170.890.657.929	168.275.301.506	98,47%
		18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	100,00%	125.121.903.000	119.946.168.567	95,86%
	2	**Pengelolaan Pendidikan Khusus** **Indikator : Persentase Sekolah Pendidikian Khusus yang terakreditasi minimal B**		**72,34%**	**72,34%**	**100,00%**	**59.535.567.448**	**56.972.295.736**	**95,69%**
		1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4 Ruang	4 Ruang	100,00%	774.999.650	765.338.910	98,75%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5 Ruang	1 Ruang	20,00%	477.420.000	204.965.940	42,93%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	100,00%	477.840.000	473.820.000	99,16%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	100,00%	177.600.000	177.600.000	100,00%
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10 Unit	10 Unit	100,00%	2.627.536.910	2.377.437.869	90,48%
		6	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	2 Ruang	2 Ruang	100,00%	562.909.200	549.110.800	97,55%
		7	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1 Ruang	1 Ruang	100,00%	155.400.000	155.400.000	100,00%
		8	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	5 Ruang	5 Ruang	100,00%	774.270.000	769.927.500	99,44%
		9	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	100,00%	197.037.500	195.991.950	99,47%
		10	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 ruang	1 ruang	100,00%	196.400.000	194.889.042	99,23%
		11	Rehabilitasi Asrama Sekolah	2 Unit	2 Unit	100,00%	301.520.000	297.864.488	98,79%
		12	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 unit	2 unit	100,00%	194.554.965	193.008.426	99,21%
		13	Pengadaan Mebel Sekolah	3 Paket	3 Paket	100,00%	1.214.297.575	1.050.474.600	86,51%
		14	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Paket	1 Paket	100,00%	194.807.500	191.497.350	98,30%
		15	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	6 Paket	6 Paket	100,00%	1.421.684.301	1.373.420.050	96,61%
		16	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	100,00%	21.207.393.485	20.073.023.189	94,65%
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	640 Peserta Didik	640 Peserta Didik	100,00%	2.216.058.190	2.162.091.964	97,56%

		18	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	790 Orang	869 Orang	110,00%	6.326.841.995	5.952.926.761	94,09%
		19	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100,00%	77.166.547	75.999.100	98,49%
		20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	100,00%	15.309.029.630	15.123.998.297	98,79%
		21	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	100,00%	4.650.800.000	4.613.509.500	99,20%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM **Indikator : Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal**			**85,00%**	**100,00%**	**117,65%**	**708.689.937**	**651.143.420**	**91,88%**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah **Indikator : Jumlah kurikulum muatan lokal yang diimplementasi pada satuan pendidikan menengah**			**1 Kurikulum**	**1 Kurikulum**	**100,00%**	**708.689.937**	**651.143.420**	**91,88%**
		1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	96 Orang	96 orang	100,00%	708.689.937	651.143.420	91,88%
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			**65%**	**100%**	**153,85%**	**387.069.596**	**306.837.393**	
	1.		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**65 Poin**	**100%**	153,85%	**387.069.596**	**306.837.393**	**79,27%**
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokuemen	1 Dokumen	100,00%	253.299.804	194.536.416	76,80%
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	133.769.792	112.300.977	83,95%
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			**100%**	**100%**	**100,00%**	**266.741.126**	**228.728.304**	
	1		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**40 Dokumen**	**100%**	250,00%	**156.572.999**	**148.362.073**	**94,76%**
		1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	83.580.627	78.882.623	94,38%
		2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	72.992.372	69.479.450	95,19%
	2		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**10 Dokumen**	**100%**	100,00%	**110.168.127**	**80.366.231**	**72,95%**
		1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	49.999.975	29.186.725	58,37%

	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	60.168.152	51.179.506	85,06%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan**			**100%**	**100%**	**100,00%**	**8.396.333.104**	**7.352.303.317**	**87,57%**
CABANG DINAS WILAYAH I						**1.426.846.071**	**843.004.728**	**59,08**
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah** **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**	**240.853.350**	**237.050.557**	**98,42%**
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50 Paket	96,44%	59.819.100	57.692.349	96,44%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	960 Paket	960 Paket	97,65%	38.000.000	37.107.855	97,65%
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	94,77%	15.000.000	14.216.103	94,77%
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 Laporan	100,00%	128.034.250	128.034.250	100,00%
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS Yang Dilayani**		**14 Orang**	**14 Orang**	**100,00%**	**208.799.276**	**188.426.172**	**90,24%**
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	29.998.940	17.829.900	59,44%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	178.800.336	170.596.272	95,41%
3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**		**100%**	**100%**	**100,00%**	**87.972.920**	**87.070.999**	**98,97%**
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	37.972.920,00	37.070.999,00	97,62%
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
4	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** **Indikator : Persentase SMA yang berakreditasi**		**94,47%**	**81,95%**	**86,50%**	**694.114.107**	**167.802.000**	**24,17%**
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4 Ruang	4 Ruang	100,00%	194.120.418	167.802.000	86,44%
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	480 Orang	0%	0,00%	499.993.689	-	0,00%
5	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah** **Indikator : Persentase SMK yang berakreditasi minimal B**		**86,54%**	**75,24%**	**86,94%**	**195.106.418**	**162.655.000**	**83,37%**
	1	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	100,00%	195.106.418	162.655.000	83,37%
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	480 Orang	0%	0,00%	-	-	0,00%

	CABANG DINAS WILAYAH II						**2.400.198.497**	**2.192.474.060**	**91,35**
	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah** **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**	**309.843.542**	**298.661.180**	**96,39%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50 Paket	100,00%	59.997.492,00	59.346.528,00	98,92%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	960 Paket	960 Paket	100,00%	37.966.000,00	37.801.136,00	99,57%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	100,00%	14.926.550,00	14.746.016,00	98,79%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100,00%	196.953.500,00	186.767.500	94,83%
	2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** **Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS Yang Dilayani**		**10 Orang**	**10 Orang**	**100,00%**	**192.000.620**	**167.763.809**	**87,38%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	31.416.924	26.953.297	85,79%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan	100,00%	160.583.696	140.810.512	87,69%
	3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**100%**	**100%**	**100,00%**	**94.538.660**	**94.077.599**	**99,51%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	44.538.660	44.077.599	98,96%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	50.000.000	50.000.000	100,00%
	4	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** **Indikator : Persentase SMA yang berakreditasi**		**94,47%**	**81,95%**	**86,50%**	**935.882.755**	**864.573.379**	**92,38%**
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	100,00%	489.104.267	479.029.593	97,94%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	480 Orang	480 Orang	100,00%	446.778.488	385.543.786	86,29%
	5	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah** **Indikator : Persentase SMK yang berakreditasi**		**86,54%**	**75,24%**	**86,94%**	**867.932.920**	**767.398.093**	**88,42%**
		1	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	5 Ruang	5 Ruang	100,00%	489.222.925	486.028.269	99,35%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	480 Orang	480 Orang	100,00%	378.709.995	281.369.824	74,30%
	CABANG DINAS WILAYAH III						**2.032.371.787**	**1.825.416.856**	**89,82**
	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah** **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**		**1 Dokumen**	**100%**	**96,00%**	**254.732.557**	**219.224.072**	**86,06%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50 paket	98,00%	59.997.755	58.873.017	98,13%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	960 Paket	960 paket	100,00%	38.000.000	19.045.055	50,12%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	96,00%	14.999.802	14.391.000	95,94%

		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	90,00%	141.735.000	126.915.000	89,54%
	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator :Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**13 Orang**	**100%**	**100,00%**	**200.177.784**	**179.129.532**	**89,49%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	29.999.304	19.472.012	64,91%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 laporan	7 laporan	100,00%	170.178.480	159.657.520	93,82%
	3		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**85.360.000**	**84.864.000**	**99,42%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	35.360.000	34.864.000	98,60%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	50.000.000	50.000.000	100,00%
	4		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator : Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**	**94,47%**	**81,95%**	**86,50%**	**662.632.709**	**588.281.738**	**88,78%**
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	88,00%	205.294.596	179.863.780	87,61%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	480 Orang	480 Orang	89,00%	457.338.113	408.417.958	89,30%
	5		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Indikator : Persentase SMK yang berakreditasi**	**86,54%**	**75,24%**	**86,94%**	**829.468.737**	**753.917.514**	**90,89%**
		1	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	92,00%	373.550.942	344.098.750	92,12%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	480 Orang	480 Orang	90,00%	455.917.795	409.818.764	
	CABANG DINAS WILAYAH IV						**2.536.916.749**	**2.491.407.673**	**98,21**
	1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**100%**	**100,00%**	**287.994.577**	**287.908.077**	**99,97%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50 Paket	100,00%	54.999.784	54.999.784	100,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	960 Paket	960 Paket	100,00%	38.000.000	37.996.000	99,99%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	100,00%	9.999.793	9.999.793	100,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100,00%	184.995.000	184.912.500	99,96%
	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator :Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**14 Orang**	**100%**	**100,00%**	**232.901.584**	**203.803.359**	**87,51%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	49.999.216	21.941.991	43,88%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	182.902.368	181.861.368	99,43%

	3		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**97.999.997**	**97.502.150**	**99,49%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 Unit mobil Dinas	100,00%	37.999.997	37.502.150	98,69%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 Unit Sewa Gedung Kantor	100,00%	60.000.000	60.000.000	100,00%
	4		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** **Indikator : Persentase SMA yang berakreditasi**	**94,47%**	**81,95%**	**86,50%**	**951.791.743**	**947.878.539**	**100,00%**
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	3 Sekolah SMA	100,00%	499.930.418	496.733.968	99,36%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	480 Orang	480 orang	100,00%	451.861.325	451.144.571	99,84%
	5		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah** **Indikator : Persentase SMK yang berakreditasi**	**86,54%**	**75,24%**	**86,94%**	**966.228.848**	**954.315.548**	**98,77%**
		1	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	3 Sekolah SMK	100,00%	499.986.418	496.118.618	99,23%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	480 Orang	480 Orang	100,00%	466.242.430	458.196.930	98,27%
JUMLAH							**2.519.251.569.846**	**2.447.731.641.175**	**97,16**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. H. KAMSOL**

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. SYAMSUAR, M.Si**

Jabatan : GUBERNUR RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihakpertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Juli 2023

Pihak Kedua

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

Pihak Pertama

Dr. H. KAMSOL
Pembina Utama Madya
NIP. 19650314 199403 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Rata- rata lama sekolah penduduk umur >25 Tahun	9,29-9,35
		2. Harapan Lama Sekolah	13,44-13,53
2	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	1. APK SM Sederajat	91,90
		2. APM SM Sederajat	67,88
		3. Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,73
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A	44,94
4	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau	74

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1.153.229.732.155,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 1.332.531.490.646,00	APBD
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp 799.999.807,00	APBD
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 449.999.811,00	APBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp 418.199.376,00	APBD

Pekanbaru, Juli 2023

Pihak Kedua

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

Pihak Pertama

Dr. H. KAMSOL
Pembina Utama Madya
NIP. 19650314 199403 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts...56.../2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

c. bahwa pejabat yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu serta memahami syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyususnan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (DPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022 sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan mengolah data Realisasi Indikator Renstra / IKU;
2. Menganalisa dan mengevaluasi Realisasi Data yang dibandingkan dengan Target Indikator Renstra;
3. Menyusun Dokumen LKJIP
4. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugasnya kepada Pimpinan OPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PEKANBARU**
Pada tanggal : 6 Januari 2023

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts..56..../2023
Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	M. JOB KURNIAWAN, AP, M.Si NIP. 19750528 199412 1 001	Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU	PENANGGUNG JAWAB
2	TATI LINDAWATI, SH, M.Si NIP. 19660717 198603 2 002	SEKRETARIS	KETUA
3	M. HIDAYAT SYAH, S.STP. M.Si NIP. 19851203 200412 1 002	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PROGRAM (PERENCANA AHLI MUDA)	SEKRETARIS
4	Drs. PAHMIJAN, M.Pd NIP. 19660205 199702 1 002	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA	ANGGOTA
5	DASRIL, M.Pd NIP. 19711207 199802 1 007	KEPALA BIDANG PENDATAAN & PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	ANGGOTA
6	FITRA JAYA PURNAMA, ST, MT NIP. 19781113 200501 1 003	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PKPLK	ANGGOTA
7	Dr. ARDEN SIMERU, SP.d, M.Kom NIP. 19770807 200904 1 001	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK	ANGGOTA
8	SISKA ANJAROHANI, SE NIP. 19830329 201001 2 039	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA	ANGGOTA
9	YENNY MARYATI, SE NIP. 19810130 200902 2 004	FUNGSIONAL UMUM PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
10	ROVI NOVITASARI, ST NIP. 19911105 201903 2 001	FUNGSIONAL UMUM PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
11	ALI SODIQ, SE NIP. -	TENAGA HONORER PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner